



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026



*Balai Pelaksana
Penyediaan dan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Sulawesi III*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan tersebut, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja di masa mendatang.

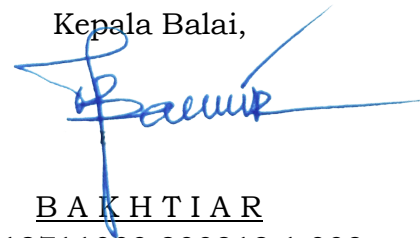
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, serta kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di periode selanjutnya.

Akhir kata, semoga kerja sama, komitmen, dan semangat perbaikan terus menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pada periode berikutnya.

Makassar, 8 April 2026

Kepala Balai,



BAKHTIAR

NIP. 19711000 200212 1 003





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS DAN FUNGSI	9
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	12
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	18
2.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.	18
2.2 Metode Pengukuran Kinerja	36
2.3 Capaian Target Triwulan BP3KP Sulawesi III.....	38
2.4 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan	78
BAB III PENUTUP.....	80
3.1 Rencana Tindak Lanjut	80
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan.....	82
LAMPIRAN	84





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026	19
Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026.....	21
Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026	22
Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026.....	24
Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026.....	25
Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026.....	28
Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026	29
Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026	32
Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	33
Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	35
Tabel 2.11 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja	37





Tabel 2.12 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian	40
Tabel 2.13 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026.....	42
Tabel 2.14 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026	46
Tabel 2.15 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026	49
Tabel 2.16 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026	54
Tabel 2.17 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026	58
Tabel 2.18 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026.....	63
Tabel 2.19 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026.....	67
Tabel 2.20 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026	73
Tabel 2.21 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026	75
 Tabel 3. 1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	 82





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.....	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.....	16
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	17
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	17
Gambar 2 1 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	44
Gambar 2 2 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	45
Gambar 2 3 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	52
Gambar 2 4 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	53
Gambar 2 5 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	61
Gambar 2 6 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	62
Gambar 2 7 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	71
Gambar 2 8 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	72
Gambar 2 9 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	76
Gambar 2 10 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	77





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja





Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P Sulawesi III Tahun 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 20 menyebutkan laporan kinerja dihasilkan dari suatu SAKIP yang diselenggarakan masing-masing identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan informasi antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum dalam perencanaan kinerja tahun 2026;
2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan
3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menguatkan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

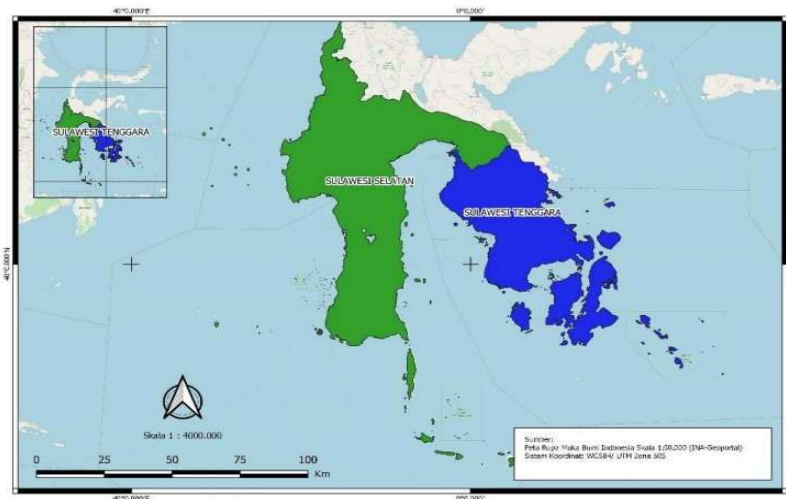
1. Rencana Strategis.
2. Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja.
4. Pengelolaan Data Kinerja.
5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P2P Sulawesi III Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III merupakan salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan Perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sebelum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III) di kenal sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III (BP2P Sulawesi III) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang fokus pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di daerah masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, dan fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana.

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:



1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah Satuan Kerja diantaranya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Adapun susunan Struktur Organisasi yaitu :

1.1.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

1. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja. Kepala Balai juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kasubag Umum dan Tata Usaha

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan



usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran belanja.

6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran. PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut.

7. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja.



Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana, mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang –undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas melakukan

Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus deleniasi perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman





PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

F. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang -undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan



permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

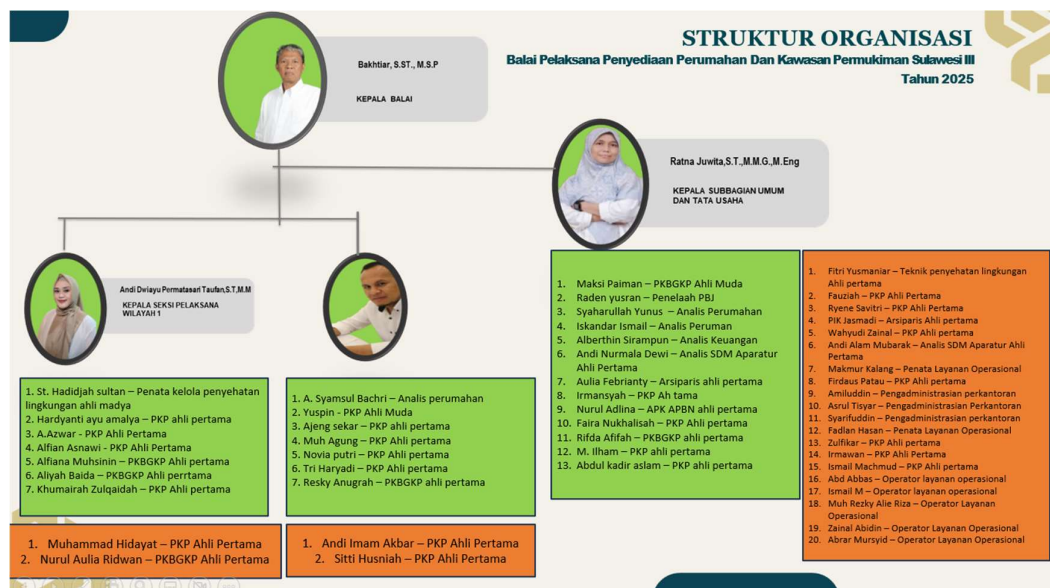
H. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

I. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 2 (Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

[illegible]

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

```

graph TD
    H[Muh, Irsan Basalamah, S.T., M.T.  
Kepala Satuan Kerja] --- AS[Laode Sirafin Sarini, S.T.  
Asisten KPA]
    H --- B1[Mardiana Muchtar, S.T.  
Dejabat Penandatangan  
Surat Perintah Membayar  
(PPSPM)]
    H --- B2[Muh, Irsan Basalamah, S.T., M.T.  
PKK Perencanaan dan Pengembangan]
    H --- B3[Lili Damayanto, S.T.  
PKK Rumah Swadaya, PSU dan  
Kawasan Permukiman]
    H --- B4[Fitriani, A. Md  
Bendahara Pengeluaran]
    H --- B5[Muhtar Mustafa, S.T., M.  
Pejabat Pengadaa Barang dan Jasa]

    B1 --- B1L1[Nurul Bidayni Sukardi, S.E.  
Asisten Pengeluaran APBN Ahli Pertama]
    B1 --- B1L2[Annisa, S.T.  
PKD Ahli Pertama]

    B2 --- B2L1[Indah Mustika Hatti, S.E., MM  
(KAUR Administrasi)]
    B2 --- B2L2[Hamda Thahid, S. Ars  
(KAUR Teknik)]
    B2L1 --- B2L1L1[Arif Dedi Susanto, S.E.  
Asisten Ahli Pertama]
    B2L1 --- B2L1L2[Oei Sulisati  
Pengadministrasi Perkantoran]
    B2L1 --- B2L1L3[Audrey Dani Ailf Perdana Lohy  
Pengadministrasi Perkantoran]
    B2L2 --- B2L2L1[Marhabianto, S.T.  
PKD Ahli Pertama]
    B2L2 --- B2L2L2[Achmad Zulfikar Ma'ruf, S.T.  
PKD/CP Ahli Pertama]
    B2L2 --- B2L2L3[Moh Difaq Agustina, S.Ars  
PKD Ahli Pertama]
    B2L2 --- B2L2L4[Muh Fakhriana Putra, S.T  
PKD Ahli Pertama]
    B2L2 --- B2L2L5[Mursyid Hidayat, S.Ars  
PKD Ahli Pertama]

    B3 --- B3L1[Iai Capriyani Husen, S.T  
(KAUR Administrasi)]
    B3 --- B3L2[Fuad Ashad Langguta, S.T  
(KAUR Teknik)]
    B3L1 --- B3L1L1[Yuni Kasari Ailif Bidaniga, S.T.  
PKD Ahli Pertama]
    B3L2 --- B3L2L1[Amalia Nur Annisa Raisio, S.Ars  
PKD/CP Ahli Pertama]
    B3L2 --- B3L2L2[Ardan Pratista, S.T  
PKD Ahli Pertama]
    B3L2 --- B3L2L3[Muhammad Mukhlis, S.T., M.T  
PKD Ahli Pertama]

    B4 --- B4L1[Waede Wende Anella Halim, S.E  
Senior Layanan Operasional]
    B4L1 --- B4L2[Lewi Palang, S.T  
Pembata Layanan Operasional]

    B5 --- B5L1[Yenni Syamuel Bahel, S.Ars  
PKD/CP Ahli Pertama]
    B5L1 --- B5L2[Ardiyanto, S.T  
Pembata Layanan Operasional]
    B5L1 --- B5L3[Eko Muli, S.E  
Pembata Layanan Operasional]
  
```

Keterangan
 ■ PNS
 ■ PPPK

BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.

Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan tahapan awal pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Pada periode ini, pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pemenuhan target awal yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Aksi, sebagai dasar untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara bertahap. Target yang ditetapkan mencerminkan kemajuan awal pelaksanaan program, baik dari aspek fisik maupun keuangan, sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Triwulan I difokuskan pada persiapan administrasi, penyusunan dokumen perencanaan dan pendukung kegiatan, pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, verifikasi dan validasi data, serta dimulainya pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Di samping itu, kegiatan dukungan manajemen, seperti layanan perkantoran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta penyediaan sarana dan prasarana, turut dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target serta mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut sejak dini.

Capaian kinerja pada Triwulan I menjadi dasar dalam menilai perkembangan awal pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur tingkat kesesuaian antara target dan realisasi yang telah dicapai. Hasil evaluasi pada periode ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan Triwulan I diharapkan mampu membangun fondasi yang kuat bagi pencapaian target kinerja tahunan secara efektif, efisien, dan akuntabel.



*Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026*

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya layanan dukungan manajemen								
Jumlah Layanan Umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	- Belanja Bahan	21,21	49,58	77,94	100,00
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan	21,21	49,58	77,94	100,00

				Daya dan Jasa Lainnya - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				
Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	10 unit	10 unit	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25,05	75,15	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen direncanakan untuk mendukung kelancaran operasional satuan kerja melalui tiga indikator kinerja, yaitu Jumlah Layanan Umum sebanyak 3 layanan, Jumlah Layanan Perkantoran sebanyak 3 layanan, dan Jumlah Layanan Sarana Internal sebanyak 10 unit. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh belanja bahan, berbagai komponen belanja operasional perkantoran, serta belanja modal peralatan dan mesin. Target capaian layanan umum dan layanan perkantoran direncanakan meningkat secara bertahap dari 21,21% pada Triwulan I, 49,58% pada Triwulan II, 77,94% pada Triwulan III, hingga mencapai 100,00% pada Triwulan IV. Adapun layanan sarana internal ditargetkan mulai terealisasi pada Triwulan II sebesar 25,05%, meningkat menjadi 75,15% pada Triwulan III, dan mencapai 100,00% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target layanan



dukungan manajemen diharapkan dapat diselesaikan secara optimal sesuai rencana aksi pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,85	16,21	25,66	35,12	44,58	54,03	63,49	72,94	82,40	97,86	100,00
Fisik	0,00	5,85	21,21	30,66	40,12	49,58	59,03	68,49	77,94	87,40	96,86	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan mulai sebesar 0,85% pada Februari, meningkat menjadi 16,21% pada Maret, 44,58% pada Juni, 72,94% pada September, 97,86% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 5,85% pada Februari, 21,21% pada Maret, 49,58% pada Juni, 77,94% pada September, 96,86% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik direncanakan sedikit lebih cepat dibandingkan penyerapan anggaran guna memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan mendukung optimalisasi realisasi anggaran pada akhir tahun.



Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	23,1 8	50,4 6	77,73	100
Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomem dasi Kebijakan	1 Rekomem dasi Kebijakan	1 Rekomem dasi Kebijakan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	23,1 8	50,4 6	77,73	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Teknis Penyiapan	23,1 8	50,4 6	77,73	100



dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman				
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Jumlah Layanan Umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya layanan umum	23,18	50,46	77,73	100
Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	23,18	50,46	77,73	100
Jumlah Layanan BMN	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya Layanan BMN	23,18	50,46	77,73	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.3 Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen direncanakan berlangsung secara bertahap hingga mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sasaran yang akan dicapai meliputi penyusunan 1 Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, 1 Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 1 Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penyelenggaraan 3 Layanan Umum, 1 Layanan Data dan Informasi, dan 1 Layanan BMN. Seluruh indikator direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 23,18% pada Triwulan I,



meningkat menjadi 50,46% pada Triwulan II, 77,73% pada Triwulan III, dan mencapai 100% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kinerja diharapkan dapat diselesaikan sesuai rencana pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	9,09	18,18	27,28	36,37	45,46	54,55	63,64	72,73	81,83	90,92	100,00
Fisik	0,00	14,09	23,18	32,28	41,37	50,46	59,55	68,64	77,73	86,83	95,92	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 9,09% pada Februari, 45,46% pada Juni, 72,73% pada September, 90,92% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif, yaitu 14,09% pada Februari, 23,18% pada Maret, 50,46% pada Juni, 77,73% pada September, 95,92% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik direncanakan sedikit lebih cepat dibandingkan penyerapan anggaran sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu serta mendukung optimalisasi realisasi anggaran pada akhir tahun.



*Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026*

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekome- n-dasi Kebijakan	1 Rekome- n-dasi Kebijakan	1 Rekome- n-dasi Kebijakan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan								
Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan,	Rekome- n-dasi Kebijakan	1 Rekome- n-dasi	1 Rekome- n-dasi	Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan	17,44	46,63	75.8 1	100

Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan		dasi Kebijakan	Kebijaka n	Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan				
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan	17,44	46,63	75.8 1	100



Perumahan Perkotaan				Kualitas Perumahan Perkotaan				
Program Dukungan Manajemen								
Jumlah layanan umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya layanan umum	17,44	46,63	75.8 1	100
Jumlah data dan informasi	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya data dan informasi	17,44	46,63	75.8 1	100
Jumlah layanan BMN dan Manajemen Keuangan	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya layanan BMN dan Manajemen Keuangan	17,44	46,63	75.8 1	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.5 Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen direncanakan berlangsung secara bertahap untuk mendukung pencapaian sasaran strategis di bidang perumahan perkotaan. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup penyusunan 1 rekomendasi kebijakan strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan, 3 laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, serta masing-masing 1 rekomendasi kebijakan terkait penyiapan lahan, perizinan dan penghunian, pembiayaan perumahan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk mendukung kelancaran operasional melalui penyelenggaraan 3 layanan umum, 1 layanan data dan informasi, serta 1 layanan BMN dan manajemen



keuangan. Seluruh indikator direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 17,44% pada Triwulan I, meningkat menjadi 46,63% pada Triwulan II, 75,81% pada Triwulan III, dan mencapai 100% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kinerja diharapkan dapat diselesaikan secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	2,72	12,44	22,17	31,90	41,63	51,36	61,09	70,81	80,54	90,27	100,00
Fisik	0.00	7,72	17,44	27,17	36,90	46,63	56,36	66,09	75,81	95,22	98,88	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan table 2.6 di atas berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 2,72% pada Februari, 12,44% pada Maret, 41,63% pada Juni, 70,81% pada September, 90,27% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 7,72% pada Februari, 17,44% pada Maret, 46,63% pada Juni, 75,81% pada September, 95,22% pada Oktober, 98,88% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik diharapkan mendahului penyerapan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan target kinerja maupun realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.



Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	Melaksanakan rekomendasi penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00



Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan,Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	Melaksanakan Kebijakan,Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraa n Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraa n Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraa n Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan								
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00



				Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan				
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaaan	18,24	47,16	76,08	100,00
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan								
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Melakukan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	18,24	47,16	76,08	100,00
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
Jumlah Layanan Umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya Layanan Umum	18,24	47,16	76,08	100,00
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	18,24	47,16	76,08	100,00

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.



Berdasarkan table 2.7 diatas Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan perumahan perdesaan secara menyeluruh. Sasaran yang akan dicapai meliputi penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pembangunan, peningkatan kualitas, keterpaduan dan kemitraan, penyiapan lahan, perizinan, penghunian, serta pembiayaan perumahan perdesaan, disertai penyusunan dokumen data dan informasi, dokumen dukungan teknis, serta laporan pemantauan dan evaluasi sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, Program Dukungan Manajemen mendukung pencapaian sasaran melalui penyelenggaraan 3 layanan umum dan 1 layanan data dan informasi. Seluruh indikator kinerja direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 18,24% pada Triwulan I, meningkat menjadi 47,16% pada Triwulan II, 76,08% pada Triwulan III, dan mencapai 100,00% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kinerja diharapkan dapat terealisasi secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	3,60	13,24	22,88	32,52	42,16	51,80	61,44	71,08	80,72	90,36	100,00
Fisik	0,00	8,60	18,24	27,88	37,52	47,16	56,80	66,44	76,08	95,22	98,88	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan table 2.8 diatas Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 3,60% pada Februari, 13,24% pada



Maret, 42,16% pada Juni, 71,08% pada September, 90,36% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 8,60% pada Februari, 18,24% pada Maret, 47,16% pada Juni, 76,08% pada September, 95,22% pada Oktober, 98,88% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik diharapkan lebih dahulu berkembang dibandingkan penyerapan anggaran, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan target kinerja serta realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	23,1 8	50,4 6	77,74	100
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melakukan Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	23,1 8	50,4 6	77,74	100



Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	23,18	50,46	77,74	100
--	---------	-----------	-----------	---	-------	-------	-------	-----

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pengendalian risiko. Sasaran yang akan dicapai meliputi penyusunan 1 rekomendasi/laporan kebijakan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas melalui pembangunan Zona Integritas, 1 rekomendasi/laporan kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi melalui penyusunan dan penerapan manajemen risiko, serta 1 laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko. Seluruh indikator kinerja direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 23,18% pada Triwulan I, meningkat menjadi 50,46% pada Triwulan II, 77,74% pada Triwulan III, dan mencapai 100,00% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara optimal pada akhir tahun anggaran.



Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	9,09	18,18	27,28	36,37	45,46	54,55	63,64	72,74	81,83	90,92	100,00
Fisik	0,00	14,09	23,18	32,28	41,37	50,46	59,55	68,64	77,74	95,22	98,88	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.10 diatas berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 9,09% pada Februari, 18,18% pada Maret, 45,46% pada Juni, 72,74% pada September, 90,92% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 14,09% pada Februari, 23,18% pada Maret, 50,46% pada Juni, 77,74% pada September, 95,22% pada Oktober, 98,88% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik direncanakan lebih cepat dibandingkan penyerapan anggaran sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga target kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kinerja. Data terkait pencapaian target masing-masing kinerja diperoleh berdasarkan hasil laporan oleh PPK dan Kasatker sebagai penanggungjawab data. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

Rumus: persentase capaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat di bawah ini:



Tabel 2.11 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja

Kondisi	Keterangan
x 100%	Sangat Baik
85% s/d 100%	Baik
75% s/d 85%	Cukup Baik
55% s/d 75%	Sedang
< 55%	Kurang

Berdasarkan Tabel 2.11 menjelaskan skala pengukuran ordinal yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan persentase capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil capaian dengan nilai lebih dari 100% dikategorikan Sangat Baik, sedangkan capaian pada rentang 85% sampai dengan 100% termasuk kategori Baik. Selanjutnya, capaian 75% sampai dengan 85% diklasifikasikan sebagai Cukup Baik, capaian 55% sampai dengan 75% berada pada kategori Sedang, dan capaian di bawah 55% masuk dalam kategori Kurang. Skala pengukuran ini menjadi dasar dalam mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai pencapaian kinerja setiap indikator, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



2.3 Capaian Target Triwulan BP3KP Sulawesi III.

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, BP3KP Sulawesi III telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada tahapan persiapan, koordinasi, pengumpulan data dan informasi, penyusunan dokumen pendukung, serta pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional sebagai fondasi dalam pencapaian target kinerja tahunan. Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja Triwulan I menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Program yang dilaksanakan mencakup penyelenggaraan sistem dan strategi perumahan dan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan pengembangan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas perumahan, serta dukungan manajemen. Masing-masing program dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan, dokumen teknis, laporan pemantauan dan evaluasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran dan dukungan operasional.

Secara umum, realisasi kinerja pada Triwulan I telah menunjukkan kemajuan yang sejalan dengan target rencana aksi. Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, khususnya dalam percepatan penyelesaian output kegiatan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta optimalisasi realisasi anggaran. Dengan dukungan koordinasi yang baik antarunit kerja dan pemantauan secara berkala, BP3KP Sulawesi III optimis seluruh indikator

kinerja dan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

2.2.1 Capaian Target Triwulan I Program Dukungan Manajemen

Capaian target Triwulan I BP3KP Sulawesi III pada Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:



Tabel 2.12 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian

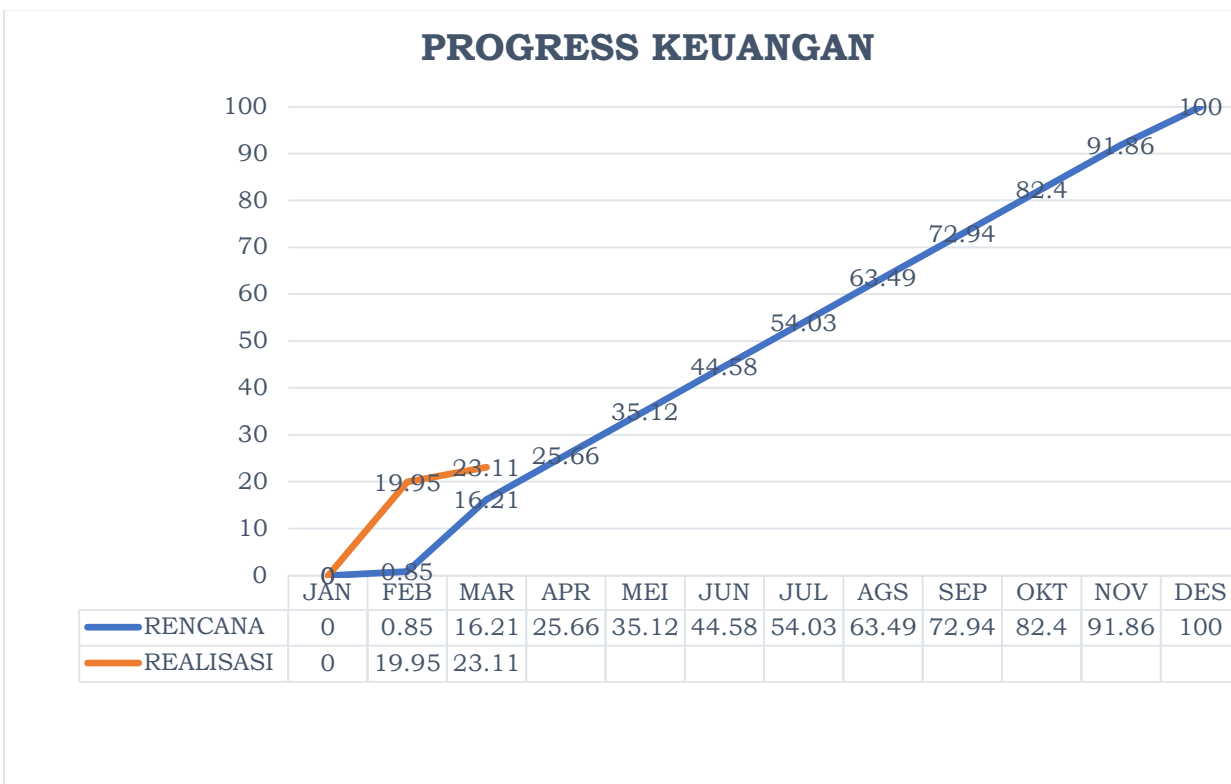
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN I		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III					
Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	21,21%	1,21%	- Belanja Bahan
Jumlah Layanan Perkantoran	3	Layanan	21,21%	25,85%	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Langganan Daya dan Jasa - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

					- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin
Jumlah Layanan Sarana Internal	10 unit	0,00%	0,00%	0,00%	

Berdasarkan tabel 2.12 diatas Pada Triwulan I, pelaksanaan kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III menunjukkan capaian yang bervariasi. Indikator Jumlah Layanan Umum belum mencapai target, dengan realisasi sebesar 1,21% dari target 21,21% karena realisasi belanja bahan masih menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, indikator Jumlah Layanan Perkantoran melampaui target, dengan realisasi 25,85% dari target 21,21%, didukung oleh terealisasinya belanja operasional perkantoran, meliputi belanja keperluan perkantoran, barang operasional, barang persediaan konsumsi, jasa pos dan giro, langganan daya dan jasa, langganan air, serta pemeliharaan peralatan dan mesin. Adapun indikator Jumlah Layanan Sarana Internal belum terealisasi (0,00%) karena pelaksanaan pengadaan masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan pada triwulan berikutnya.

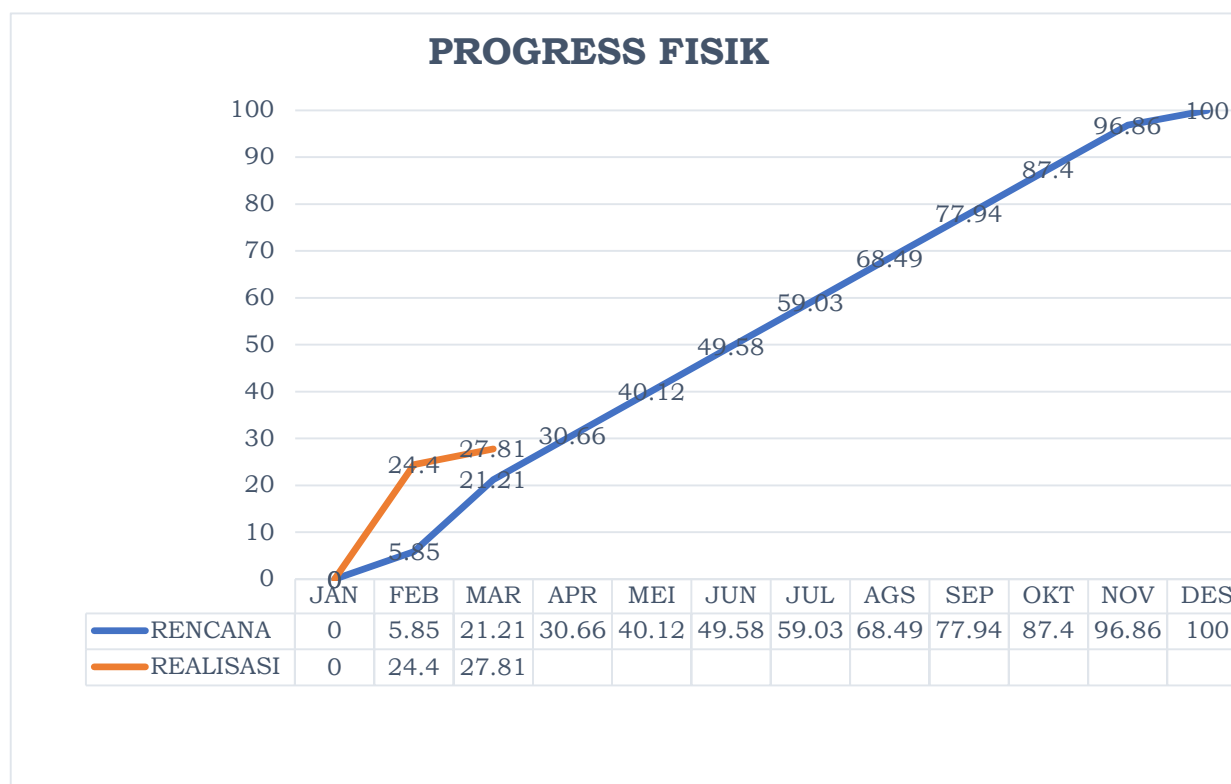


Berdasarkan tabel 2.13 diatas progres fisik per paket kegiatan, total pagu anggaran sebesar Rp1.220.605.000 dengan realisasi hingga periode pelaporan mencapai Rp282.029.296. Secara kumulatif, progres fisik meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 24,40% pada Februari dan 27,81% pada Maret. Paket Operasional Pemeliharaan Kantor mencatat progres tertinggi di antara kegiatan yang sedang berjalan, yaitu 54,16%, diikuti Honor Operasional Satuan Kerja sebesar 17,01%, Langganan Daya dan Jasa sebesar 15,84%, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebesar 9,53%, dan Layanan Umum sebesar 6,21%. Sementara itu, paket Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi telah mencapai progres fisik 100,00%, meskipun realisasi keuangannya masih belum tercatat. Secara keseluruhan, capaian progres fisik menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, namun masih diperlukan percepatan penyelesaian pekerjaan dan optimalisasi penyerapan anggaran agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana. Adapun capaian progres keuangan dan progres fisik pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 pada triwulan I dapat dilihat dalam kurva S sebagai berikut:



Berdasarkan grafik Progress Keuangan, hingga akhir periode realisasi keuangan baru mencapai 23,11%, sementara target rencana pada periode yang sama seharusnya telah mencapai 100%. Pada awal tahun, realisasi menunjukkan percepatan dengan capaian 19,95% pada Februari yang telah melampaui target bulanan sebesar 0,85%. Namun, sejak Maret hingga Desember tidak terjadi peningkatan realisasi sehingga tetap berada pada angka 23,11%, sedangkan target rencana terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 100% pada akhir tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi yang cukup besar antara target dan realisasi, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian proses administrasi, serta optimalisasi penyerapan anggaran agar capaian keuangan dapat mendekati target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.2 diatas grafik Progress Fisik, realisasi fisik hingga Triwulan I mencapai 27,81%, melampaui target rencana sebesar 21,21%, sehingga terdapat selisih positif sebesar 6,60%. Pada Februari, realisasi fisik telah mencapai 24,40%, jauh di atas target sebesar 5,85%, kemudian meningkat menjadi 27,81% pada Maret. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik pada awal tahun, target progres fisik selanjutnya terus meningkat hingga 100% pada akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan, mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana sehingga target fisik tahunan dapat tercapai secara optimal.



Tabel 2.14 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN I		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	18,18	78,37	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	1	Rekomendasi Kebijakan	18,18	26,21	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	18,18	51,59	- Belanja Sewa - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Program Dukungan Manajemen					
'Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	18,18	0,00	Belum ada realisasi keuangan
Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	18,18	0,00	Belum ada realisasi keuangan



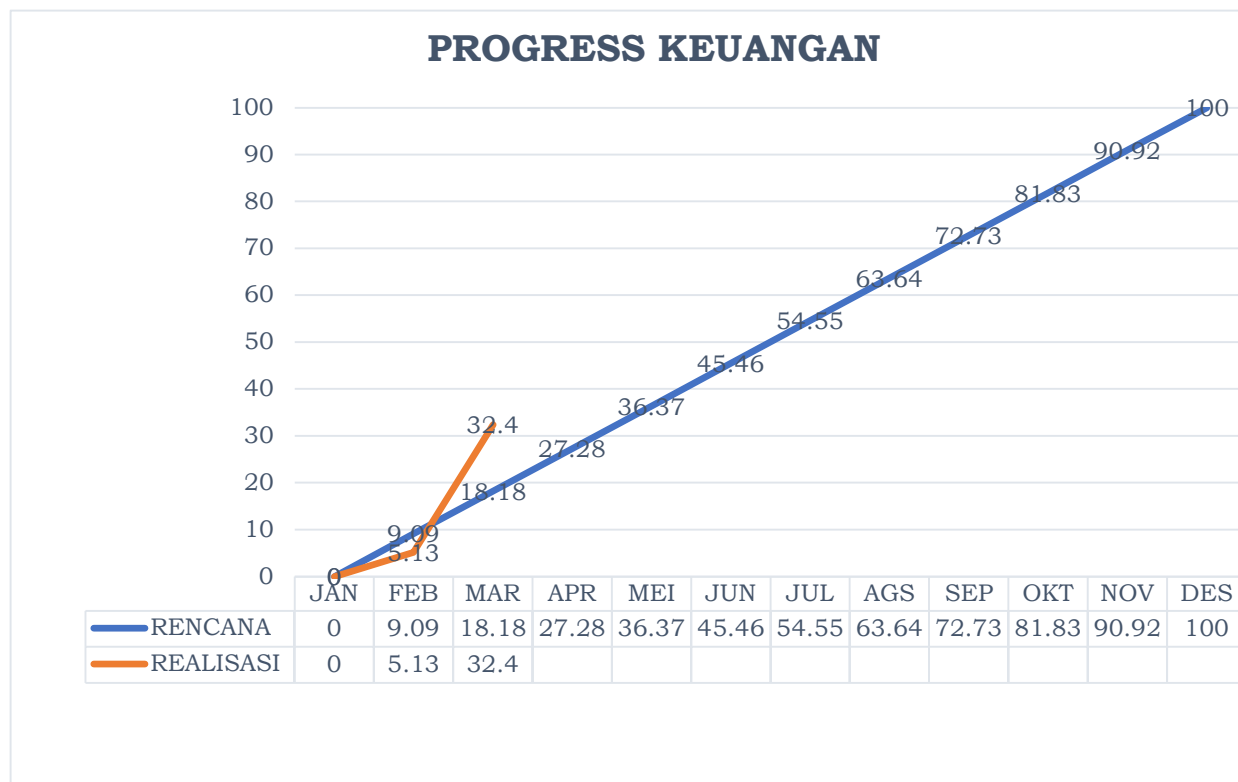
Jumlah Layanan BMN	1	Layanan	18,18	0,00	Belum ada realisasi keuangan
--------------------	---	---------	-------	------	------------------------------

Berdasarkan Tabel 2.14 diatas capaian kinerja Triwulan I, pelaksanaan kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada indikator yang didukung oleh realisasi belanja operasional. Indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman telah mencapai realisasi keuangan sebesar 78,37% terhadap target triwulan 18,18%, yang didorong oleh pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Selanjutnya, indikator Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai realisasi 26,21%, juga didukung oleh Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Sementara itu, indikator Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman mencatat realisasi sebesar 51,59%, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan Belanja Sewa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Di sisi lain, seluruh indikator pada Program Dukungan Manajemen, yaitu Jumlah Layanan Umum, Jumlah Layanan Data dan Informasi, dan Jumlah Layanan BMN, masih menunjukkan realisasi keuangan 0,00% karena pada Triwulan I belum terdapat pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan realisasi anggaran. Secara umum, capaian Triwulan I mencerminkan bahwa realisasi anggaran telah mulai berjalan pada kegiatan teknis utama, sedangkan kegiatan dukungan manajemen masih akan direalisasikan pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kebutuhan operasional.

Perumahan dan Kawasan Permukiman															
TOTAL	251.375.000	81.442.040	0	6,34	36,20										

Berdasarkan table 2.15 diatas progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I, total pagu anggaran sebesar Rp251.375.000 telah terealisasi sebesar Rp81.442.040 atau sekitar 32,40% dari total pagu. Capaian realisasi terutama didorong oleh tiga paket kegiatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan, yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir dengan progres fisik mencapai 78,37%, Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar 51,59%, serta Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 26,21%. Sementara itu, tiga paket kegiatan lainnya, yaitu Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, belum menunjukkan realisasi pada Triwulan I karena pelaksanaannya dijadwalkan pada periode berikutnya sesuai rencana kerja dan kebutuhan operasional. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, dengan fokus pada penyelesaian kegiatan teknis prioritas sebagai dasar pencapaian target kinerja hingga akhir tahun anggaran.

Gambar 2 3 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Berdasarkan gambar 2.3 diatas grafik Progress Keuangan sampai dengan Triwulan I, realisasi anggaran menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan berada di atas target rencana. Pada bulan Februari, realisasi keuangan mencapai 5,13%, masih berada di bawah target rencana sebesar 9,09%. Namun, pada bulan Maret terjadi peningkatan yang signifikan sehingga realisasi mencapai 32,40%, melampaui target rencana Triwulan I sebesar 18,18% atau lebih tinggi 14,22 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada akhir Triwulan I berjalan lebih cepat dari yang telah direncanakan, sehingga memberikan indikasi positif terhadap pencapaian target kinerja serta menjadi modal yang baik untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya.

Gambar 2 4 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.4 diatas grafik Progress Fisik sampai dengan Triwulan I, pelaksanaan fisik kegiatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Pada bulan Februari, realisasi fisik mencapai 6,34%, masih berada di bawah target rencana sebesar 14,09%. Namun, pada bulan Maret terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi fisik meningkat menjadi 36,20%, lebih tinggi dibandingkan target rencana Triwulan I sebesar 23,18% atau melampaui target sebesar 13,02 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dukungan positif terhadap pencapaian target kinerja tahunan serta menjadi modal yang baik untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pada triwulan-triwulan selanjutnya.



Tabel 2.16 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN I		KETERANGAN
			TARGET	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	17,44	27,04	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3	Laporan	17,44	0	Belum ada realisasi keuangan



Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan					
Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	17,44	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	17,44	34,08	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	17,44	72,26	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	17,44	34,53	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
---	---	-----------------------	-------	-------	----------------------------------

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	17,44	0	Belum ada realisasi
Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	17,44	0	Belum ada realisasi
Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1	Layanan	17,44	0	Belum ada realisasi



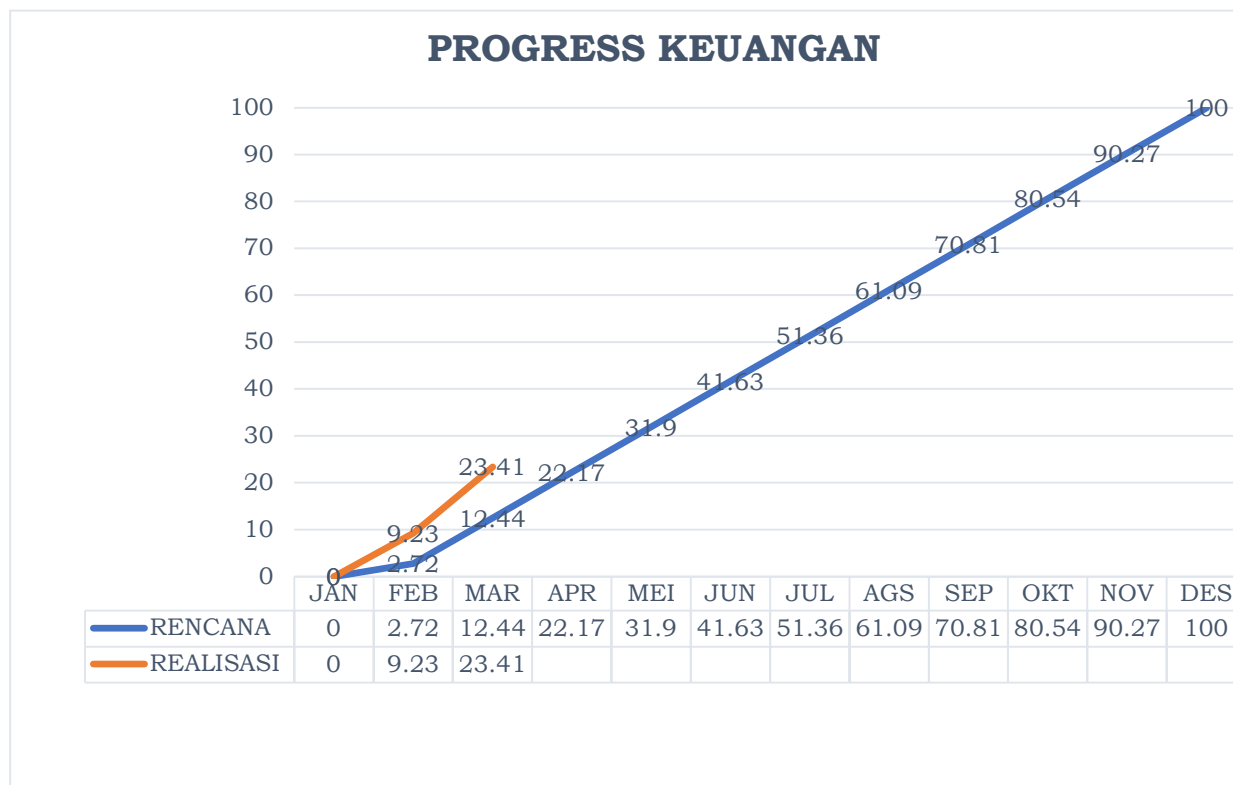
Berdasarkan Tabel 2.16 di atas pada Triwulan I, capaian kinerja BP3KP Sulawesi III menunjukkan bahwa sebagian indikator telah mulai direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Capaian tertinggi terdapat pada indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan sebesar 72,26%, diikuti Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebesar 34,53%, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan sebesar 34,08%, dan Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 27,04%. Sementara itu, beberapa indikator lainnya, yaitu Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan, serta seluruh indikator layanan dukungan manajemen belum menunjukkan realisasi karena belum terdapat realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I. Kondisi tersebut sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada triwulan berikutnya sehingga target kinerja tahunan tetap diharapkan dapat tercapai.



	Balai P3KP Sulawesi III														
9	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya di Balai P3KP Sulawesi III	15.141.000	0	0	0	0									
TOTAL		286.369.000	67.038.888	0	11,45	26,58									

Berdasarkan Tabel 2.17 diatas Pada Triwulan I, realisasi pelaksanaan paket kegiatan BP3KP Sulawesi III mencapai Rp67.038.888 atau menunjukkan progres fisik kumulatif sebesar 26,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp286.369.000. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa paket kegiatan yang telah mulai direalisasikan, yaitu Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan dengan progres fisik tertinggi sebesar 72,26%, diikuti Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan sebesar 34,08%, Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebesar 34,53%, serta Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Sulawesi III sebesar 27,04%. Sementara itu, paket kegiatan lainnya belum menunjukkan realisasi fisik maupun keuangan karena pelaksanaannya masih menyesuaikan jadwal kegiatan dan rencana penarikan anggaran pada triwulan berikutnya, sehingga diharapkan seluruh target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Gambar 2 5 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Berdasarkan gambar 2.5 diatas grafik Progress Keuangan, hingga akhir Triwulan I realisasi keuangan menunjukkan kinerja yang melampaui rencana. Pada bulan Februari, realisasi keuangan mencapai 9,23%, lebih tinggi dibandingkan target rencana sebesar 2,72%, sedangkan pada bulan Maret realisasi meningkat menjadi 23,41%, melampaui target rencana sebesar 12,44%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada awal tahun berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, sehingga memberikan ruang yang baik bagi percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Dengan tren tersebut, diharapkan realisasi keuangan dapat terus dipertahankan sesuai rencana penarikan anggaran hingga mencapai target 100% pada akhir tahun anggaran.

Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Berdasarkan Gambar 2.6 grafik Progress Fisik, hingga akhir Triwulan I realisasi fisik menunjukkan capaian yang melampaui target rencana. Pada bulan Februari, progres fisik mencapai 11,45%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 7,72%, sedangkan pada bulan Maret meningkat menjadi 26,58%, melampaui target rencana sebesar 17,44%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, sehingga memberikan indikasi positif terhadap efektivitas pelaksanaan program pada awal tahun anggaran. Dengan tren yang baik ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terus dipertahankan sesuai rencana sehingga target progres fisik sebesar 100% pada akhir tahun anggaran dapat tercapai secara optimal.



Tabel 2.18 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN I		KETERANGAN
			TARGET	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	13,24	70,85	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
---	---	-----------------------	-------	-------	----------------------------------

Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	13,24	44,64	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
---	---	-----------------------	-------	-------	----------------------------------

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan
---	---	---------	-------	---	------------------------------

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan					
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaaan	1	Dokumen	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan					
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	1	Kegiatan	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan

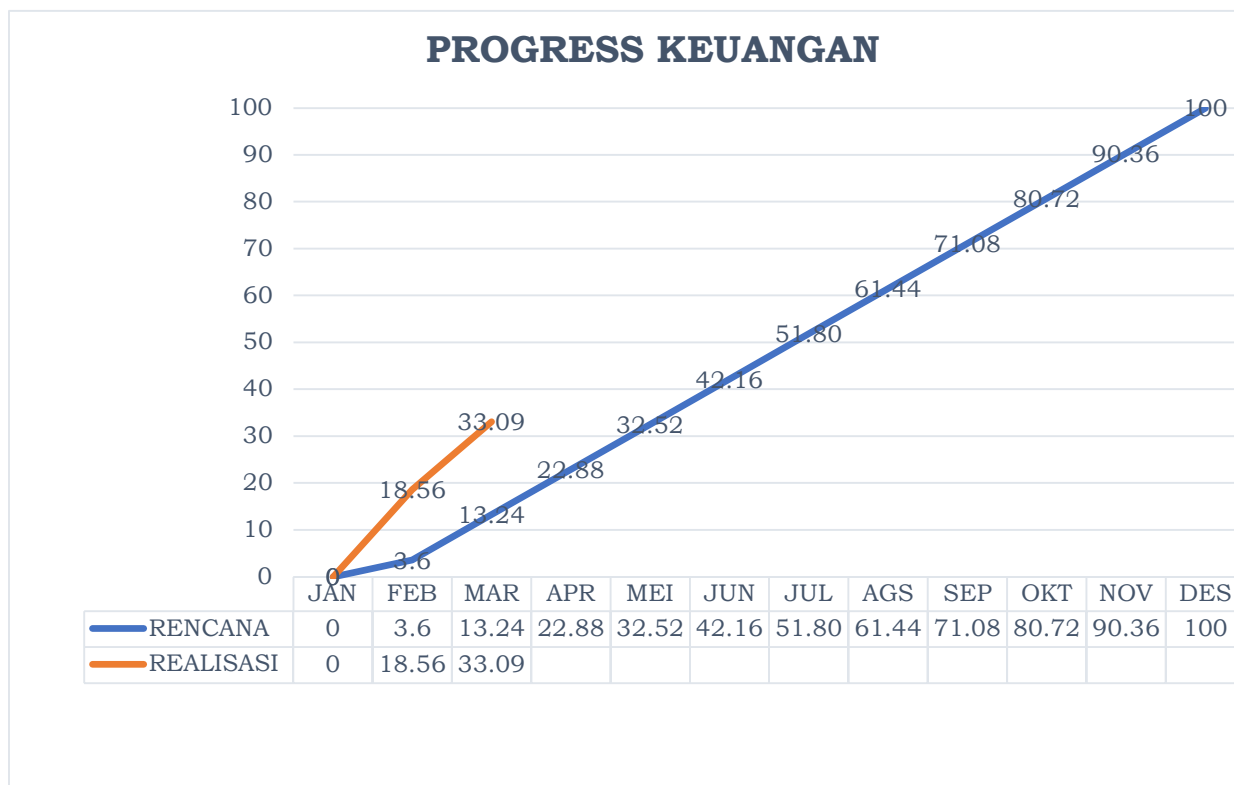
Pembiayaan Perumahan Perdesaan					
Program Dukungan Manajemen					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan					
Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	13,24	0	Belum ada realisasi keuangan

Berdasarkan table 2.18 diatas Pada Triwulan I, capaian kinerja penyelenggaraan perumahan perdesaan menunjukkan bahwa sebagian indikator telah mulai direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dan perjalanan dinas. Indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mencatat capaian tertinggi sebesar 70,85%, diikuti Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebesar 44,64%, yang didukung oleh realisasi belanja perjalanan dinas biasa. Sementara itu, indikator lainnya, seperti Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan, Laporan Pemantauan dan Evaluasi, Dokumen Data dan Informasi, Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan, Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan

	Total	373.332.000	54.743.841	0	23,61	36,57									
--	-------	-------------	------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan table 2.19 diatas pada Triwulan I, pelaksanaan paket kegiatan penyelenggaraan perumahan perdesaan di BP3KP Sulawesi III menunjukkan realisasi keuangan sebesar Rp54.743.841 dari total pagu anggaran Rp373.332.000, dengan progres fisik kumulatif mencapai 36,57%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan yang mencapai progres fisik 70,85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp23.012.340, serta Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yang mencapai progres fisik 44,64% dengan realisasi keuangan sebesar Rp31.731.501. Sementara itu, sembilan paket kegiatan lainnya belum menunjukkan realisasi fisik maupun keuangan karena pelaksanaannya masih menyesuaikan jadwal kegiatan dan rencana penarikan anggaran pada triwulan berikutnya. Secara keseluruhan, capaian Triwulan I menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan prioritas telah dimulai sesuai tahapan yang direncanakan dan menjadi dasar untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Gambar 2 7 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Berdasarkan gambar 2.7 grafik Progress Keuangan, realisasi keuangan hingga akhir Triwulan I menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah direncanakan. Pada bulan Februari, realisasi keuangan mencapai 18,56%, jauh lebih tinggi dibandingkan target rencana sebesar 3,60%, sedangkan pada bulan Maret meningkat menjadi 33,09%, melampaui target rencana sebesar 13,24%. Capaian tersebut mencerminkan percepatan pelaksanaan anggaran pada awal tahun, terutama didukung oleh terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan teknis peningkatan kualitas perumahan perdesaan dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Dengan realisasi yang berada di atas target rencana, pelaksanaan anggaran pada Triwulan I memberikan landasan yang baik untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan sehingga target realisasi keuangan sebesar 100% pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai rencana.

Gambar 2.8 Grafik Realisasi Fisik Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Berdasarkan Gambar 2.6 grafik Progress Fisik, realisasi fisik hingga akhir Triwulan I menunjukkan capaian yang berada di atas target yang telah direncanakan. Pada bulan Februari, progres fisik mencapai 23,61%, jauh melampaui target rencana sebesar 8,60%, sedangkan pada bulan Maret meningkat menjadi 36,57%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 18,24%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik pada awal tahun berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, terutama didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan teknis peningkatan kualitas perumahan perdesaan dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Dengan realisasi fisik yang telah melampaui target Triwulan I, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat terus dipertahankan sehingga target progres fisik sebesar 100% pada akhir tahun anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana.



Tabel 2.20 Capaian Target Kinerja Triwulan I BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN I		KETERANGAN
			TARGET	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi / Laporan	23,18	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Rekomendasi / Laporan	23,18	0	Belum ada realisasi keuangan

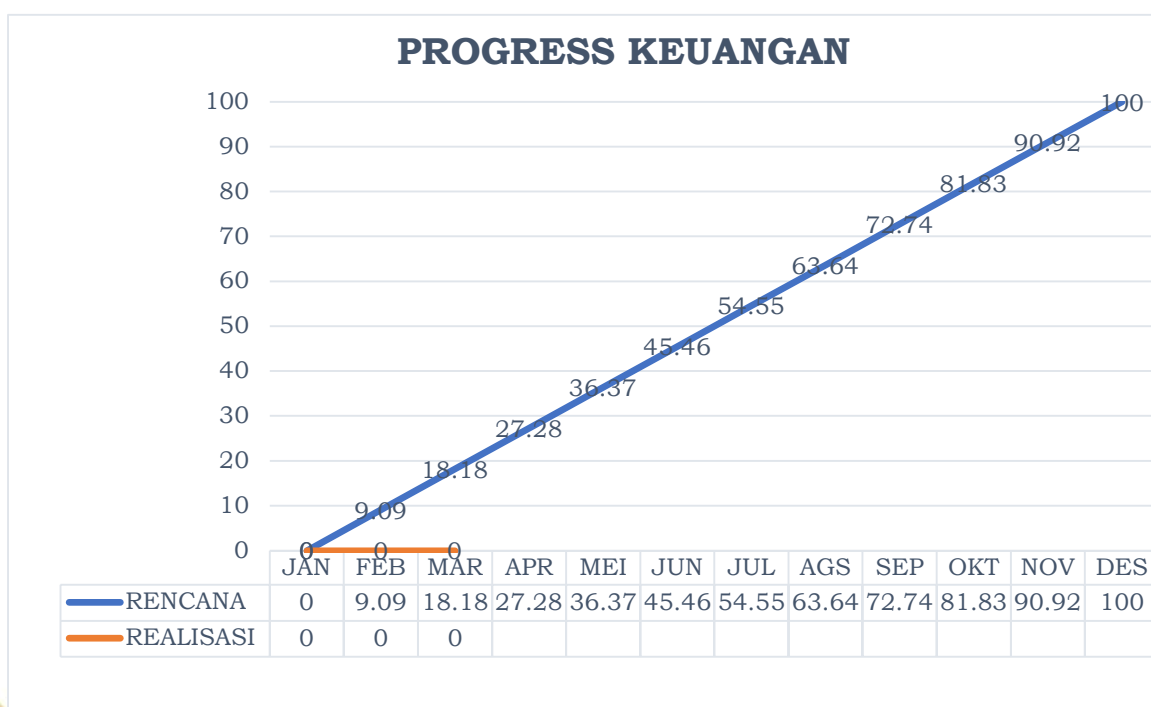


Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman					
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1	Laporan	23,18	0	Belum ada realisasi keuangan

Berdasarkan table 2.20 diatas Pada Triwulan I, capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan yang meliputi peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan publik, dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, serta peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman belum menunjukkan realisasi. Masing-masing indikator memiliki target capaian Triwulan I sebesar 23,18%, namun realisasi yang dicapai masih sebesar 0% karena belum terdapat realisasi keuangan pada periode pelaporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan maupun laporan pemantauan dan evaluasi masih berada pada tahap persiapan administrasi dan perencanaan, sehingga pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran diharapkan dapat mulai terealisasi pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 2.21 diatas realisasi pelaksanaan kegiatan Triwulan I, seluruh paket kegiatan pada lingkup penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko belum menunjukkan realisasi keuangan maupun progres fisik. Empat paket kegiatan, yaitu Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III, Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP Sulawesi III, Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP Sulawesi III, serta Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, memiliki total pagu anggaran sebesar Rp164.706.000, namun hingga akhir Triwulan I realisasinya masih sebesar Rp0,00 dengan progres fisik 0%. Belum terserapnya anggaran disebabkan kegiatan pada periode Triwulan I masih difokuskan pada tahapan persiapan, antara lain penyusunan rencana kerja, penjadwalan kegiatan, penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), proses administrasi dan pengadaan, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan kebijakan dan agenda kerja unit organisasi. Selain itu, sebagian besar kegiatan bersifat konsultatif dan koordinatif sehingga pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan berikutnya setelah seluruh dokumen pendukung dan kesiapan administrasi terpenuhi. Dengan demikian, realisasi fisik maupun keuangan diharapkan mulai meningkat pada Triwulan II seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Gambar 2 9 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan I BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko





Berdasarkan Gambar 2.10 grafik progres fisik, hingga akhir Triwulan I realisasi fisik masih 0%, sedangkan target progres fisik berdasarkan rencana kerja seharusnya telah mencapai 23,18% pada bulan Maret. Belum tercapainya target tersebut disebabkan seluruh kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan belum memasuki fase pelaksanaan. Kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP), serta Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih difokuskan pada penyusunan dokumen pendukung, koordinasi dengan unit terkait, penjadwalan kegiatan, serta pemenuhan persyaratan administrasi sebelum pelaksanaan dapat dimulai. Oleh karena itu, belum terdapat output fisik yang dapat diukur pada Triwulan I. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai berlangsung pada Triwulan II sehingga progres fisik diharapkan meningkat secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mampu mengejar target hingga akhir tahun anggaran.

2.4 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan

2.4.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana.
2. Pelaksanaan verifikasi usulan bantuan perumahan mengalami hambatan
3. Sasaran penerima program BSPS dan bantuan penanganan kawasan kumuh yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan kriteria penerima BSPS (SE. No. 04/TKPR/2025)
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan (BSPS, PSU, Rusun) belum berjalan optimal.



5. Perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan berkala di kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh berjalan kurang optimal.

2.4.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pada program BSPS Instruksi Verifikasi untuk bulan januari sudah terbit namun belum bisa dilaksanakan karena belum melakukan perekrutan Tenaga Fasilitator.
2. Masih adanya desa/kelurahan yang alokasinya dibawah 10 unit yang tidak sesuai ketentuan juknis dan anggaran DIPA yang belum cukup pada program BSPS;
3. Pada program Kawasan Kumuh Kabupaten Wajo permasalahan yang terjadi yaitu Menunggu proses tindak lanjut hasil Audit BPKP atas pekerjaan yang tidak selesai (cutoff) pada tahun anggaran 2025;
4. Menunggu tindak lanjut biro pengadaan barang dan jasa terkait paket pekerjaan kawasan kumuh pada kabupaten wajo apakah melanjutkan kontrak atau kontrak baru;
5. Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2026 Tahap I;
6. Pada program PSU pada triwulan 1 belum ada kegiatan.

2.4.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Belum ada kendala permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ini.



BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu:

3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Kabalai dan Direktorat Teknis Wilayah III (Dit. SSPKP, Dit. Kawasan Permukiman, dan Dit. TKPR) untuk pelaporan kegiatan yang berjalan optimal.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan
3. Melakukan Pembinaan teknis berupa sosialisasi bahan ajar/modul terbaru kepada fasilitator BPS untuk memasifkan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dampingan agar masyarakat memahami statusnya dan syaratnya sebagai PB BPS
4. Melakukan rapat daring untuk memeriksa hasil verifikasi CPB oleh fasilitator lapangan
5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 Tahun 1999 dan pedoman teknis terkait kepada SDM Program Benar PKP

3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja



pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Melakukan koordinasi ke pusat terkait panduan pelaksanaan BSPS TA 2026 dan melakukan rekrutmen Tenaga Ahli, Korkab/ Kota dan TFL;
2. Melakukan koordinasi dengan Pihak pengusul untuk identifikasi desa prioritas disesuaikan dengan juknis dan permintaan penambangan anggaran;
3. Menunggu Proses Klaim Jaminan Pelaksanaan, jaminan uang Muka dan Penayangan Sanksi daftar hitam;
4. Menyiapkan skenario kemungkinan untuk kontrak baru maupaun kontrak lanjutan agar pada saat keputusan dari biro pengadaan barang dan jasa sudah ada, pekerjaan bisa segera dilaksanakan;
5. Penyiapan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dan Koordinasi balai terkait SPL;
6. Menunggu arahan dari pusat terkait program PSU.

3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada Triwulan I dan penyusunan Laporan AKIP baru dimulai pada Triwulan I, maka belum terdapat permasalahan pada triwulan sebelumnya yang perlu ditindak lanjuti pada triwulan ini.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan

Adapun bukti tindak lanjut atas permasalahan yang telah dipetakan pada triwulan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan

TRIWULAN I			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut
1.	Perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan berkala di kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh berjalan kurang optimal.	Kasie Wil 1 berkoordinasi dengan Kabalai dan Direktorat Teknis Wilayah III (Dit. SSPKP, Dit. Kawasan Permukiman, dan Dit. TKPR) untuk pelaporan kegiatan yang berjalan optimal.	1. Laporan Hasil Kegiatan/Rapat (Notulensi/Dokumentasi)
2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan (BSPS, PSU, Rusun) belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan	1. Laporan hasil koordinasi pelaksanaan monev 2. Laporan berkala progres kegiatan fisik.

3.	Sasaran penerima program BSPS dan bantuan penanganan kawasan kumuh yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan kriteria penerima BSPS (SE. No. 04/TKPR/2025)	Pembinaan teknis berupa sosialisasi bahan ajar/modul terbaru kepada fasilitator BSPS untuk memasifkan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dampingan agar masyarakat memahami statusnya dan syaratnya sebagai PB BSPS.	1. Tabel data CPB Instruksi Verifikasi di Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir. 2. Tabel data kependudukan Penerima Bantuan yang telah memenuhi kriteria Desil di DTSEN.
4.	Pelaksanaan verifikasi usulan bantuan perumahan mengalami hambatan	BSPS: melakukan rapat daring untuk memeriksa hasil verifikasi CPB oleh fasilitator lapangan	Laporan hasil verifikasi CPB BSPS
5.	Risiko terjadinya kesalahan administrasi serta keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Penguatan pengendalian internal melalui verifikasi berjenjang atas dokumen dan tahapan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Laporan Keuangan
6.	Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana.	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 Tahun 1999 dan pedoman teknis terkait kepada SDM Program Benar PKP	Laporan Bulan Januari Klinik PKP BP3KP Sulawesi III, Laporan Bulan Februari Klinik PKP BP3KP Sulawesi III



LAMPIRAN





DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Jalan Penjernihan Raya No.22, Kompleks PDAM, Panaikang, Makassar 90231 Email : bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

NOTULENSI RAPAT

- Agenda : *Rapat Kunjungan DPRD Kab. Konawe Kepulauan dalam Rangka Konsultasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*
- Tanggal / Pukul : 03 Maret 2026
- Lokasi : Ruang Rapat Kepala Balai P3KP Sulawesi III
- Peserta Rapat :
 1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
 3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I
 4. Ketua DPRD Kab. Konawe Kepulauan
 5. Wakil Ketua I & II DPRD Kab. Konawe Kepulauan
 6. Ketua Komisi II
 7. Staf Seksi Pelaksana Wilayah I

Pembahasan :

Konsultasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Kepala Balai:

Menyampaikan pelaksanaan program-program Kementerian PKP di Balai, di antaranya:

- Program yang BSPS saat ini di Konawe Kepulauan sebanyak 200 unit
- Terkait kegiatan Kawasan Kumuh ada kegiatan di Buton pada tahun 2025
- Untuk Rusun pada tahun 2025 belum ada pelaksanaan
- PSU di kota Kendari untuk pendandatangan bersama Wamen

DPRD Kab. Konawe Kepulauan (Wakil Hanura, Gerindra, Demokrat, PDIP)

- Mengapresiasi bantuan kementerian dalam peningkatan Rumah Tidak layak huni
- Mempersiapkan dokumen penunjang untuk kebutuhan persyaratan bantuan dari kementerian

Perwakilan Gerindra

- Apakah 200 unit ini inisiasi pusat atau dari pemda

J: ada inisiasi dari menteri untuk pemerataan bantuan di seluruh indonesia dan sudah diwujudkan dari 200 unit tersebut di konawe kepulauan,

- Nilai bantuan untuk 1 unit berapa?

J: 20 Juta Per unit, 17,5 untuk bahan 2,5 untuk upah, bila sudah ada Perjanjian Kerjasama dengan Bank penyalur maka Bank akan menyalurkan dana ke



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Jalan Penjernihan Raya No.22, Kompleks PDAM, Panaikang, Makassar 90231 Email : bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

penerima bantuan, untuk bahan, Kelompok Penerima Bantuan akan memilih toko lewat pemilihan toko terbuka dengan kriteria harga terendah, diundang oleh KPB tersebut. Akan ada Laporan Penyaluran Dana untuk

- Apakah tukang dipilih atau boleh siapa saja?

J: Iya bisa dari siapa saja dalam bentuk keswadayaan tenaga

- Apa pengendalian dari balai untuk mencegah kerjassama Ketua KPB dengan pemilik toko?
- Ada kasus dimana bahan bantuan dijual oleh penerima bantuan?

J: TFL dan Korkab dan Balai melakukan pengendalian, dan ddokumentasi yang ketat untuk mencegah hal tersebut.

Terkait DTSEN pemda wajib mengusulkan di SIBARU dan dari daftar usulan tersebut wajib yang sudah terdaftar di DTSEN

Perwakilan Demokrat

- Bantuan ini apakah dalam bentuk tunai atau bahan disampaikan ke penerima bantuan?
- Bila masih ada ruang untuk menambah kuota, apa yang perlu disiapkan untuk persyaratan tersebut?

J: Program BSPS di tahun 2026 dialokasikan oleh Kementerian sebanyak lebih dari 400.000 unit, yang merupakan jumlah bantuan terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk saat ini Konawe Kepulauan sudah mendapatkan 200 unit, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan alokasi sebanyak 12.000 sehingga kemungkinan bantuan untuk Konawe Kepulauan masih akan bertambah.

Perwakilan Hanura

- Apa kriteria penerima manfaat untuk program tersebut?

J: Dalam BSPS yang menjadi persyaratan penerima bantuan adalah keswadayaan penerima, dimana penerima menyatakan bersedia/mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas rumah, baik dalam bentuk dana, material atau tenaga

- Perlu adanya output untuk peningkatan, sehingga pentingnya data RTLH dari Pemda agar terdapat peningkatan



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Jalan Penjernihan Raya No.22, Kompleks PDAM, Panaikang, Makassar 90231 Email : bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

Perwakilan PDIP

- Bagaimana bila penerima bantuan hanya memiliki lahan kosong
- **J:** Tidak bisa, harus memiliki rumah hunian, dan harus tidak pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir

DOKUMENTASI





NOTULENSI RAPAT

- Agenda : Koordinasi Kab. Buton Utara Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 19 Januari 2026/09.20 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
- Peserta Rapat :

1. Muh. Irsan Basalamah	Kasatker PKP Prov. Sultra
2. Mustafa	Kadis PKP Kab. Buton Utara
3. Ikhsan Mapo	Kabid Permukiman PKP Butur
4. Sirafin Sarini	Asisten KPA
5. Awirullah	Tenaga Ahli Program BSPS
- Poin Pembahasan :

1. Pembahasan Program BSPS TA 2026
2. Pembahasan Program Sanitasi TA 2026
3. Pembahasan Program Kawasan Kumuh TA 2026
- Sesi Diskusi :

1. Pemda Kab. Buton Utara diwakili Dinas PKP Kab. Buton Utara sudah menginput data Usulan Program BSPS di Aplikasi SIBARU, kami juga membaca Hard Copy sebagai pegangan Kasatker untuk kedepannya. Penginputan data di aplikasi sudah sesuai dengan format yang tersedia meliputi : - Identifikasi Calon Penerima Bantuan - Melakukan validasi awal data untuk meminimalkan kesalahan input dan duplikasi data kami juga dari pemda meminta update informasi terkait permintaan selanjut nya dan kuota yang tersedia apabila memang Kab. Buton Utara mendapat bantuan untuk TA 2026
2. Dari kami satker sendiri, kami meminta keterlibatan pemda terkait data pengusulan bantuan dan pelaksanaan di kegiatan nantinya Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin ketepatan sasaran penerima BSPS, antara lain melalui: - Pendataan awal dan Identifikasi Calon Penerima - Verifikasi awal Data

- Pengusulan Data ke Pemerintah Pusat

Dalam tahap pelaksanaan, Pemda berperan sebagai fasilitator dan pendukung keberhasilan program, meliputi:

- Koordinasi dan Pendampingan
- Dukungan Administratif dan Teknis
- Monitoring dan Pengawasan
- Penyelesaian Permasalahan di Lapangan

Pemerintah Daerah juga memiliki dukungan penuh dengan cara menyediakan Data RTLH yang terintegrasi dan Bantuan Perumahan yang serupa.

3. Terkait penanganan permukiman kumuh, kami pihak satker meminta ketersediaan RC mohon di lengkapi. Dan kami menginformasikan kalau ada kawasan kumuh di daerah pesisir, bisa di usulkan program kampung nelayan merah putih.
4. Selain BSPS, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) juga terdapat beberapa program strategis lain, khususnya penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
 - Penanganan Kawasan Kumuh
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi luas kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan.
 - Program Sanitasi Lingkungan
Program sanitasi difokuskan pada peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
5. Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK mohon di update sebagai syarat dasar RC Penanganan Kumuh dan Sanitasi, karena kita ketahuai ada 8 RC yang harus di lengkapi untuk syarat pengusulan Program Penanganan Kumuh dan Sanitasi.
6. Sama hal nya dengan BSPS, kami dari satker sangat berharap apa bila tahun ini Pemda Kab. Butor mendapatkan Bantuan Peningkatan Penanganan Kumuh dan dan Peningkatan Sanitasi, kami mohon melibatkan penuh Pemda terkait sebagai dasar usulan bantuan.
7. Koordinasi ini sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA. 2026

Notulen

: Eka Mukti, S.E.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dokumentasi : Koordinasi Kab. Buton Utara Terkait Program Kemen PKP







NOTULENSI RAPAT

- Agenda : Koordinasi Kab. Konawe Selatan Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 22 Januari 2026/11.00 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
- Peserta Rapat :

1. Muh. Irsan Basalamah	Kasatker
2. Laode Sirafin Sarini	Asisten KPA
3. Junadi Rombe	Sekdis PKP Konsel
4. M.I. Taridala	Kasi Perkitam Konsel
5. Eka Mukti	Staff Satker PKP
- Poin Pembahasan :

1. Pembahasan Program BSPS TA 2026
2. Pembahasan Program Sanitasi TA 2026
3. Pembahasan Program Kawasan Kumuh TA 2026
- Sesi Diskusi :

1. di Buton Selatan, ketersediaan Lahan APL lebih dari 200Ha yang diperuntukan untuk pembangunan Infrastruktur Pemerintahan. Dinas PKP menusahakan Lahan sekitar 5 sampai 6 Ha untuk bidang perumahan, dikhususkan pembangunan Rumah ASN.
2. Dari kami satker sendiri, akan menyampaikan ketersediaan lahan yang pemda Busel maksudkan ke pemerintah pusat, kami juga dari pusat akan cepat menanggapi ketersediaan lahan tersebut, dikarenakan pemerintah pusat sedang gencar gencarnya mencari lahan untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan rumah MBR ataupun ASN.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin ketepatan sasaran penerima BSPS, antara lain melalui:

 - Pendataan awal dan Identifikasi Calon Penerima
 - Verifikasi awal Data

- Pengusulan Data ke Pemerintah Pusat

Dalam tahap pelaksanaan, Pemda berperan sebagai fasilitator dan pendukung keberhasilan program, meliputi:

- Koordinasi dan Pendampingan
- Dukungan Administratif dan Teknis
- Monitoring dan Pengawasan
- Penyelesaian Permasalahan di Lapangan

Pemerintah Daerah juga memiliki dukungan penuh dengan cara menyediakan Data RTLH yang terintegrasi dan Bantuan Perumahan yang serupa.

3. Terkait penanganan permukiman kumuh, kami pihak satker meminta ketersediaan RC mohon di lengkapi. Dan kami menginformasikan kalau ada kawasan kumuh di daerah pesisir, bisa di usulkan program kampung nelayan merah putih.
4. Selain BSPS, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) juga terdapat beberapa program strategis lain, khususnya penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
 - Penanganan Kawasan Kumuh
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi luas kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan.
 - Program Sanitasi Lingkungan
Program sanitasi difokuskan pada peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
5. Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK mohon di update sebagai syarat dasar RC Penanganan Kumuh dan Sanitasi, karena kita ketahuai ada 8 RC yang harus di lengkapi untuk syarat pengusulan Program Penanganan Kumuh dan Sanitasi.
6. Sama hal nya dengan BSPS, kami dari satker sangat berharap apa bila tahun ini Pemda Kab. Butor mendapatkan Bantuan Peningkatan Penanganan Kumuh dan dan Peningkatan Sanitasi, kami mohon melibatkan penuh Pemda terkait sebagai dasar usulan bantuan.
7. Koordinasi ini sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA. 2026

Notulen

: Eka Mukti, S.E.



Dokumentasi : Koordinasi Kab. Konawe Selatan Terkait Program Kemen PKP







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman

No. Surat : - /Tgl Surat : 25 Januari 2026

Hal : Rapat Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan
Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker
PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 25 Januari 2026

Yth

- | | |
|---|--|
| ☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman | ☐ Kaur Teknik PPK Randal |
| ☐ Pejabat Penandatanganan SPM | ☐ Kaur Administrasi PPK Randal |
| ☐ Bendahara | ☐ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP |
| ☐ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | ☐ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KF |
| ☐ Asisten KPA | ☐ |

Sifat : ☐ Biasa ☒ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

- | | |
|--|--|
| ☐ Memberikan dan menyampaikan saran | ☐ Monitoring Perkembangan |
| ☒ Melaksanakan / Menindaklanjuti | ☐ Dibahas bersama |
| ☐ Bicarakan dengan saya | ☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan |
| ☐ Mohon hadir mewakili saya | ☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur |
| ☐ Ikut hadir / Menugaskan Staf | ☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya |
| ☐ Diketahui / Sebagai informasi | ☐ Untuk dipedomani |
| ☐ Menyimpan dalam file | ☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan |
| ☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan | ☐ Ikuti Zoom |

Catatan

data aset rumah dan sanitasi
dikirim ke tim Aset.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Rapat Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hari/Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
- Waktu : 10:30 WITA s/d Selesai
- Lokasi : Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Tujuan Rapat : Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peserta : Rapat ini dihadiri oleh:
1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 2. Koordinator BMN Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 3. Petugas UKPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 4. Petugas UAKPB Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 5. Asisten KP Satker Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
- Pimpinan Rapat : Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Dasar Pembahasan Rapat

Rapat dilaksanakan Sehubungan dengan Surat Undangan Rapat Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Nomor UM0102-Dt/25 tanggal 23 Februari tahun 2026 hal Koordinasi Proses Serah terima Aset Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Beberapa poin pembahasan:

1. Data dan Format BMN Rumah Susun, Rumah Khusus, PSU, dan Aset Tetap diupdate ke versi PKP
2. Data BMN Kumuh dan Sanitasi Buton (DED, Fisik, dan TA/Supervisi) tahun 2025 belum ada di tim BMN Satker

3. Rincian DATIN BMN Kumuh dan Sanitasi Buton perlu dikoordinasikan ke Biro BMN dan Balai
4. Data BMN diklaster berdasarkan Jenis BMN

B. Rencana Tindak Lanjut

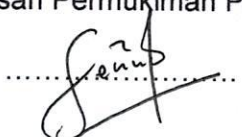
1. Dikoordinasikan kepada PPK Ruswa, PSU, dan Kawasan Permukiman untuk permintaan Dokumen BMN Kumuh dan sanitasi tahun 2025
2. Rincian DATIN BMN Kumuh dan Sanitasi Buton tahun 2025 akan dikoordinasikan ke Biro BMN dan Balai

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.

Tanda Tangan Peserta :

1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Muh. Irsan Basalamah, ST.,MT. 
2. Koordinator BMN Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Hamka Thahir 
3. Petugas UKPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Lewi Patiung 
4. Petugas UAKPB Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Yenni Syamsul Bahri 
5. Asisten KP Satker Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Laode Sirafin Sarini 



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

**RAPAT KOORDINASI KELENGAKAPAN DATA BMN DAN PERSIAPAN PROSES BAST BMN DI
LINGKUNGAN SATKER PKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman
No. Surat : - /Tgl Surat : 25 Januari 2026
Hal : Rapat Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan
Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker
PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 25 Januari 2026

Yth

- | | |
|---|--|
| ☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman | ☒ Kaur Teknik PPK Randal |
| ☐ Pejabat Penandatanganan SPM | ☐ Kaur Administrasi PPK Randal |
| ☐ Bendahara | ☐ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP |
| ☐ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | ☐ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KP |
| ☐ Asisten KPA | ☐ |

Sifat : ☐ Biasa ☒ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

- | | |
|--|--|
| ☐ Memberikan dan menyampaikan saran | ☐ Monitoring Perkembangan |
| ☒ Melaksanakan / Menindaklanjuti | ☐ Dibahas bersama |
| ☐ Bicarakan dengan saya | ☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan |
| ☐ Mohon hadir mewakili saya | ☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur |
| ☐ Ikut hadir / Menugaskan Staf | ☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya |
| ☐ Diketahui / Sebagai informasi | ☐ Untuk dipedomani |
| ☐ Menyimpan dalam file | ☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan |
| ☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan | ☐ Ikuti Zoom |

Catatan

data aset rumah dan sambutan
dikirim ke tim aset.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



Nomor : UM0102-Dt.04/25
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Koordinasi Proses Serah Terima Aset
Bantuan Pembangunan Perumahan
dan Penyediaan Rumah Khusus

Jakarta, 23 Februari 2026

Yth. Daftar terlampir

Di -

Tempat.

Dalam rangka menindaklanjuti tanggapan dan masukan yang telah diberikan terhadap surat kami sebelumnya Nomor HK0101-Dt.04/2 Tanggal 20 Januari 2026 Hal Permohonan Masukan Penyempurnaan SE Dirjen TKPR No. 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun dan SE Dirjen TKPR No. 05/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat 218 Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas
Indonesia
Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan
Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
Narasumber : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat
Jenderal Kementerian PKP
Agenda : Koordinasi Proses Serah Terima Aset Bantuan:
1. Pembangunan Rumah Susun;
2. Pembangunan Rumah Khusus;
3. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
4. Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah; dan
5. Pengembangan Permukiman.

Panitia menanggung konsumsi selama kegiatan, sedangkan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing unit kerja pengutus. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dengan Saudara Brian (HP. 085369535900) atau Saudari Diva (HP. 085877684512).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan
Penyelenggaraan Pembangunan



Sonny Surachman Ramli, S.H., L.L.M.
NIP 197103041999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
4. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan;
5. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;
6. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : UM0102-Dt.04/25

Tanggal : 23 Februari 2026

DAFTAR UNDANGAN

Hadir secara Luring:

A. Sekretariat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Kepala Biro Hukum.

B. Inspektorat Jenderal

1. Inspektur I;
2. Inspektur II;
3. Inspektur III;
4. Inspektur Bidang Investigasi.

C. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman;
5. Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

D. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
2. Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
3. Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
4. Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan;
5. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

E. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
2. Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan;
3. Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan;
4. Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan;
5. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
7. Ir. Dedy Permadi, CES, Penata Kelola Perumahan Ahli Utama.

F. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
2. Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
3. Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
4. Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
6. Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc., Penata Kelola Perumahan Ahli Utama;
7. Ir. Samson Sibarani M.T., Analis Kebijakan Ahli Madya;
8. PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hadir secara Daring:

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
6. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : UM0102-Dt.04/25

Tanggal : 23 Februari 2026

SUSUNAN ACARA

No	Waktu	Kegiatan	Moderator	Narasumber
1	08.00 – 09.00	Persiapan dan Registrasi	Panitia	
2	09.00 – 09.30	Pembukaan dan Sambutan	Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	
3	09.30 – 12.00	Koordinasi Proses Serah Terima Aset Bantuan: 1. Pembangunan Rumah Susun; 2. Pembangunan Rumah Khusus.	Kasubdit SEKPP Perkotaan	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
5	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
5	13.00 – 15.00	Koordinasi Proses Serah Terima Aset Bantuan: 1. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; 2. Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah; 3. Pengembangan Permukiman.	Plt. Kasubdit SEKPP Kawasan Permukiman	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
6	15.00 – 15.30	Kesimpulan dan Penutup	Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (Via Zoom Meeting)

Acara : Peluncuran Bps Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 Dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP TAPERA-BRI-PNM-SMF

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUH. IRSAN		KASATKER	
2	LAOPE SIRAFIN		STAF	
3	Muh. Fakhriana Purn		staf	
4	Indah MH			
5	Moh. Rifa Agustina		staf	
6	MURSYID HIDAYAT		STAFF	
7	NURUL BIDAYNI		staf	
8	ANNISA		staf	
9	Achmad Zulfikar M.		//	
10	Hamka Thahir		staf	
11				
12				
13				



NOTULENSI

- Agenda : Koordinasi Dengan Dinas PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 27 Januari 2026/09.20 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Kepala Dinas PKP Prov. Sultra
- Peserta :
1. Effendi Kadis PKP Prov. Sultra
2. La Liusu Kabid PKP Prov. Sultra
3. Ira Muchsin Kabid PKP Prov. Sultra
4. Muh. Irsan Basalamah Kasatker PKP Prov. Sultra
5. Ardhan Staff Satker PKP
6. Arif Staff Satker PKP
- Poin Pembahasan : Sharing Informasi Program Provinsi dan Pusat
- Sesi Diskusi :
1. Pemda Provinsi mempunyai program pembangunan rumah baru tipe 36 di 10 Kab./Kota yang akan diskusikan dengan Satker PKP Prov. Sultra terkait aturan yang berlaku untuk keberlanjutan program pembangunan rumah tersebut
- Pemda Prov. Sultra sementara mencari solusi untuk program tersebut supaya tidak tumpang tindih antara aturan Provinsi dan Aturan Pusat.
- Kami dari pihak satker karena program ini berbunyi pembangunan baru, sehingga menyarankan untuk memakai aturan Pembangunan Baru BSPS yang ada di Kementerian PKP.
- Tetapi Update data dari Pihak Pemda Prov. Pembangunan Baru Kementerian PKP harus berada di Kawasan Kumuh, sehingga satker mencari info dan berkomunikasi dengan pihak pusat untuk kelancaran program tersebut.
- Kami sari satker menyarankan untuk pemda prov. Kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang terkait Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tipe 36 dengan Anggaran 50juta per Unitnya.

2. Kami dari satker sendiri tetap seperti dulu, program yang sekarang BSPS, Rusun, Rusus, PSU dan penambahan Permukiman Kumuh termasuk Sanitasi serta Monitoring Penyaluran FLPP, KPP dan SBUM.

Tetapi untuk gambaran tahun ini, kemungkinan besar Pembangunan Rusun ada, Rusun Mahasiswa di Univ. Lakidende di Kab. Konawe.

Program BSPS Range berada di kisaran 4.500 Unit s/d 5.000 Unit. Tetapi itu kami ambil dari nilai terendahnya, kemungkinan besar bisa naik dan melonjak.

Untuk Permukiman Kumuh masih terfokus di penanganan Jalan, Sanitasi dan persampahan.

Untuk Rumah Khusus Pemerintah Pusat terfokus pada Bencana Alam atau Relokasi yang terdampak Program Pemerintah.

3. Menindaklanjuti Rencana kedatangan Wakil Menteri tanggal 9 Februari, Kami dari satker meminta untuk Pemda selaku perwakilan Provinsi meminta Gubernur untuk mengundang Pak Wakil Menteri untuk menghadiri rapat atau pertemuan di kantor gubernur pada tanggal 10 Februari.

Notulen : Eka Mukti, S.E.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dokumentasi : Koordinasi Dengan Dinas PKP Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait Program KemenPKP







Laporan Kunjungan Lapangan

PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui kunjungan lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku serta menjamin tercapainya sasaran program.

2. Dasar Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Program BSPS;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kunjungan lapangan adalah :

- Melakukan verifikasi kondisi rumah penerima bantuan;
- Memantau progres pelaksanaan kegiatan BSPS;
- Mengidentifikasi permasalahan di lapangan;
- Memberikan arahan dan pembinaan kepada penerima bantuan.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Hari/Tanggal : Senin/02-02-2026
2. Waktu : Jam 14.00 Sampai Selesai
3. Lokasi : Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

III. Tim Pelaksana

1. Ridwan BAE (Komisi V DPR-RI) dan tim
2. Muh. Irsan Basalamah (Kasatker PKP Sultra) dan tim
3. Koodinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Kota Kendari

IV. Objek Kunjungan

Objek kunjungan lapangan meliputi :

1. Rumah penerima bantuan BSPS;
2. Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
3. Hasil rehabilitasi rumah.

Jumlah rumah yang dikunjungi: 3 unit.

V. Hasil Kunjungan Lapangan

1. Kondisi Rumah Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kondisi rumah penerima bantuan secara umum adalah sebagai berikut :

- Struktur Bangunan : Baik
- Atap : Baik
- Dinding : Baik
- Lantai : Baik
- Sanitasi : Tersedia

Sebagian besar rumah telah memenuhi standar minimum hunian layak.

2. Progres Pelaksanaan

Progres pembangunan/rehabilitasi rumah mencapai sekitar 100%. Dengan Rincian progres:

- Pekerjaan Struktur : 100%
- Pekerjaan Dinding : 100%
- Pekerjaan Atap : 100%
- Finishing : 100%

3. Kesesuaian dengan petunjuk teknis

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BSPS di lokasi telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Namun, masih ditemukan beberapa penerima yang belum sepenuhnya memahami spesifikasi teknis bangunan.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BSPS tergolong Baik. Bentuk partisipasi antara lain :

- Swadaya tenaga kerja dalam pembangunan rumah bantuan
- Gotong royong antar warga
- Penyediaan material secara mandiri (Swadaya)
- Dukungan dari pemerintah setempat

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Kota Kendari secara umum berjalan dengan Baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu ditindaklanjuti.

- Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan intensitas pendampingan teknis;
- Memastikan ketersediaan material tepat waktu;
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah setempat;

VI. Penutup

Demikian laporan kunjungan lapangan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Program BSPS. Diharapkan hasil monitoring ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Penyusun

Kendari, 03-02-2026

Eka Mukti



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI











LAPORAN KEGIATAN

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2027

I. Dasar Kegiatan

- Undangan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.1.5/589 Tanggal 29 Januari 2026.
- Peraturan Perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah.
- Tugas dan fungsi Satuan Kerja dalam mendukung perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

II. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027.
- Memberikan masukan dan saran terkait program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Menyelaraskan program pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.

III. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 dilaksanakan pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 05-02-2026
- Waktu : Pukul 08.00 WITA s/d Selesai
- Tempat : Hotel Claro Kendari

IV. Peserta Kegiatan

- DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
- Perangkat Daerah Provinsi

- Instansi Vertikal/Perbankan (termaksud BP3KP Sul. III)
- Universitas/Akademisi
- Bappeda Kab./Kota Se-Sulawesi Tenggara
- Organisasi Non Pemerintah

V. Uraian Kegiatan

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Asisten II Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan diawali dengan pemaparan rancangan awal RKPD Tahun 2027 yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas daerah, serta indikasi program dan kegiatan strategis.

Sesi Pemaparan Materi :

- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Gambaran umum indikator makro pembangunan Sulawesi Tenggara dan peran data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel)
- KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : *Outlook* Ekonomi Sulawesi Tenggara 2027 : tantangan, peluang dan implikasinya terhadap perencanaan pembangunan daerah)
- BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2027)
- BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Optimalisasi pendapatan daerah dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah)
- BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Prioritas arah kebijakan pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2027)

Selanjutnya, dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Dalam forum tersebut, disampaikan berbagai masukan, khususnya terkait :

- Peningkatan kualitas hunian layak.
- Penanganan kawasan kumuh.
- Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Penguatan sinergi program pusat dan daerah.

Perwakilan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara turut menyampaikan usulan dan rekomendasi guna mendukung pencapaian target pembangunan sektor perumahan.

VI. Hasil Kegiatan

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain :

- Terhimpunnya masukan dan saran dari pemangku kepentingan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.
- Terjalinnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Terakomodasinya isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen perencanaan.
- Meningkatnya pemahaman peserta terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan menghadiri Undangan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 ini disusun sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Diharapkan hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Notulen : Eka Mukti



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI







NOTULENSI KOORDINASI

- Agenda : Koordinasi Kabupaten Konawe Selatan Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 06 Februari 2026/10.20 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
- Peserta Rapat : 1. Muh. Irsan Basalamah Kasatker PKP Prov. Sultra
2. Budi Utama Kabid Perumahan PKP Konsel
3. Tendri Kasie Kabid Perumahan
- Poin Pembahasan : Pembahasan Program KemenPKP
- Sesi Diskusi : 1. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), diperlukan penguatan basis data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial dan data statistik resmi. Oleh karena itu, diusulkan agar data RTLH yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program BSPS diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial serta data Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan calon penerima bantuan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta karakteristik perumahan. Integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi penetapan sasaran, meminimalkan duplikasi penerima bantuan, serta mendukung perencanaan dan pelaksanaan Program BSPS yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
2. Pelaksanaan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diawali dengan proses pengusulan yang bersumber dari pemerintah desa/kelurahan, pemerintah daerah, aspirasi DPR/DPRD, serta hasil pendataan lapangan. Usulan tersebut dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan lahan, surat keterangan penghasilan, serta dokumentasi kondisi rumah. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi oleh tim

teknis dan fasilitator untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data, termasuk status sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan kepemilikan rumah yang sah. Calon penerima yang lolos administrasi kemudian dilakukan verifikasi lapangan melalui kunjungan langsung guna mengecek kondisi fisik rumah, tingkat ketidaklayakan, status hunian, serta melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya divalidasi dan disinkronkan melalui sistem pendataan untuk memastikan keakuratan, menghindari duplikasi, serta menyesuaikan dengan basis data kependudukan. Berdasarkan data yang telah valid, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Calon Penerima Bantuan melalui Surat Keputusan.

3. Update bantuan PSU sampai sekarang belum ada kuota untuk Sultra, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan segera ada, jadi updating data untuk PSU atau bantuan lainnya disegerakan. Sama juga dengan bantuan lainnya, seperti Kumuh dan Sanitasi, update data perlu dilakukan dikarenakan bantuan tidak semestinya di tetapkan, bisa juga pemerintah pusat melihat dokumen yang terupdate, itu yang bisa di tetapkan bantuan.

4. SK Kumuh Kab. Konsel belum ada, sementara koordinasi ke Pemda Provinsi. Tetapi ada titik terang dimana Pemda Konsel menitik beratkan RC yang ada akan di lengkapi, termaksud RP2KPKPK dan RP3KP serta turunannya.

Kasatker juga menitik beratkan IUP di kab. Konsel harus diperhatikan, jangan sampai berdampak pada Kawasan Kumuh yang akan disusun.

5. Pemda Konsel mencari tahu bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan Rumah Khusus. Berdampaknya Relokasi dikawasan markas KOPASUS yang akan dibangun di Kab. Konsel. 53 Rumah yang akan berdampak Relokasi tersebut.

Kasatker tetap menginginkan update data untuk bantuan Rumah Khusus, dikarenakan bantuan rumah khusus sekarang Cuma 2 kategori yaitu Bencana Alam dan Dampak Relokasi Pembangunan Pemerintah.

Tetapi Pemda Konsel harus menyiapkan lahan untuk relokasi tersebut dan melihat siapa leader untuk relokasi tersebut, leader tersebut yang akan menyurat ke pemerintah pusat.

6. Kasatker mengingatkan untuk Pemda Konsel melihat dan mendata RTLH di bagian atau kawasan pembangunan Sekolah Garuda.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dokumentasi : Koordinasi Kabupaten Konawe Selatan Terkait Program KemenPKP







DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Rapat Peluncuran BSPS Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 Dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP TAPER-BRI-PNM-SMF
- Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026
- Waktu : 14:30 WITA s/d Selesai
- Lokasi : Ruang Rapat Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (Via Zoom Meeting)
- Rundown Acara : Sesuai Undangan Rapat
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

I. POKOK PEMBAHASAN BSPS:

A. Gambaran Umum BSPS

1. BSPS merupakan bantuan stimulan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya
2. Program berlandaskan:
 - a) UU No. 1 Tahun 2011
 - b) PP No. 14 Tahun 2016
 - c) PMK terkait bantuan pemerintah
 - d) Inpres No. 8 Tahun 2025
 - e) Permen PKP No. 10 Tahun 2025
 - f) SE Ditjen TKPR No. 1 Tahun 2026

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan:
 - a) Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
2. Manfaat:
 - a) Mendorong gotong royong
 - b) Menggerakkan ekonomi lokal
 - c) Menyerap tenaga kerja
 - d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Indikator Rumah Layak Huni

1. Kualitas struktur dan bahan bangunan
2. Keselamatan dan kesehatan
3. Pencahayaan dan penghawaan
4. Akses air minum dan sanitasi
5. Kecukupan ruang ($\geq 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$, bertahap minimal $7,2 \text{ m}^2$)

D. Prinsip Pelaksanaan BPS

1. Penerima bantuan sebagai pelaku utama
2. Bantuan bersifat stimulan (bukan pembiayaan penuh)
3. Mengedepankan keswadayaan dan gotong royong
4. Tidak ada pungutan biaya dari pihak manapun
5. Nilai bantuan sebesar $\pm \text{Rp}20.000.000/\text{unit}$
6. Pendampingan oleh TFL dan Korkab/Korkot

E. Persyaratan Penerima

1. WNI sudah berkeluarga
2. Termasuk MBR (desil 4 ke bawah / penghasilan $\leq \text{UMK/UMP}$)
3. Memiliki/menguasai tanah yang sah
4. Memiliki dan menempati RTLH
5. Belum menerima BPS/FLPP dalam 10 tahun terakhir
6. Bersedia mengikuti ketentuan program

F. Tahapan Pelaksanaan

1. Pengusulan
2. Verifikasi dan penyiapan masyarakat
3. Penetapan penerima dan pencairan bantuan
4. Penyaluran bantuan
5. Penggunaan dana tahap I
6. Penggunaan dana tahap II

Meliputi:

- Pembelian bahan bangunan
- Pelaksanaan pekerjaan fisik
- Pembayaran upah kerja
- Pelaporan tiap tahap

G. Pelaksanaan dan Contoh Kasus

1. Program menunjukkan adanya kontribusi keswadayaan masyarakat (Rp1 juta – Rp30 juta).
2. Progres pembangunan umumnya bertahap (0% – 30% – 100%).
3. Dokumentasi menunjukkan keberhasilan di berbagai daerah.

H. Kesimpulan

1. Program BPSPS merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Keberhasilan program sangat bergantung pada:
 - a) Partisipasi aktif masyarakat
 - b) Pendampingan TFL/Korkab
 - c) Kepatuhan terhadap aturan
3. Program tidak hanya berdampak pada perumahan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

I. Tindak Lanjut (Rekomendasi)

1. Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat
2. Memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pungutan liar
3. Optimalisasi peran TFL dan Korkab/Korkot
4. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat
5. Memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan

II. RINGKASAN KOLABORASI PROGRAM KOLABORASI

1. Tujuan Kolaborasi

Kolaborasi ini bertujuan untuk:

- Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Meningkatkan kualitas hunian melalui dukungan pembiayaan yang berkelanjutan
- Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan
- Menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif dan terintegrasi

2. Peran Masing-Masing Lembaga

A. Kementerian PKP

- Koordinator utama program
- Penyusun kebijakan dan regulasi
- Pelaksana program BPSPS sebagai stimulan awal

B. BP TAPERA

- Menyediakan pembiayaan perumahan jangka panjang
- Memfasilitasi akses kepemilikan rumah bagi MBR

C. BRI

- Penyalur layanan keuangan dan perbankan
- Mendukung inklusi keuangan masyarakat
- Mempermudah akses transaksi dan penyaluran bantuan

D. PNM (Permodalan Nasional Madani)

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya ultra mikro
- Pendampingan usaha produktif bagi penerima bantuan
- Meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga

E. SMF (Sarana Multigriya Finansial)

- Penyedia pembiayaan sekunder perumahan
- Menjaga likuiditas pembiayaan perumahan nasional
- Mendukung keberlanjutan pembiayaan jangka panjang

3. Skema Integrasi Program

- BSPS (stimulan awal) → meningkatkan kualitas rumah
- TAPERA & SMF → menyediakan pembiayaan lanjutan/perumahan
- BRI → menyediakan akses perbankan dan transaksi
- PNM → memperkuat ekonomi masyarakat melalui usaha produktif

Pendekatan ini mengintegrasikan:

- Bantuan fisik (rumah)
- Pembiayaan (akses kredit/perumahan)
- Pemberdayaan ekonomi (peningkatan pendapatan)

4. Manfaat Kolaborasi

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
- Mengurangi backlog perumahan dan RTLH
- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat
- Meningkatkan inklusi keuangan
- Memperkuat dampak program pemerintah secara berkelanjutan

5. Dampak yang Diharapkan

- Terbentuknya masyarakat yang tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang meningkat
- Terciptanya siklus positif antara hunian layak dan peningkatan kesejahteraan
- Penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional

6. Tantangan Utama

- Koordinasi lintas lembaga yang kompleks
- Literasi keuangan masyarakat yang masih terbatas

- Kemampuan bayar masyarakat (affordability)
- Ketepatan sasaran penerima manfaat

7. Rekomendasi

- Penguatan koordinasi dan integrasi program antar lembaga
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat
- Optimalisasi pendampingan (TFL dan lembaga terkait)
- Penguatan sistem data terpadu penerima manfaat
- Monitoring dan evaluasi terpadu

8. Kesimpulan

Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP TAPERA, BRI, PNM, dan SMF merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan hunian, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

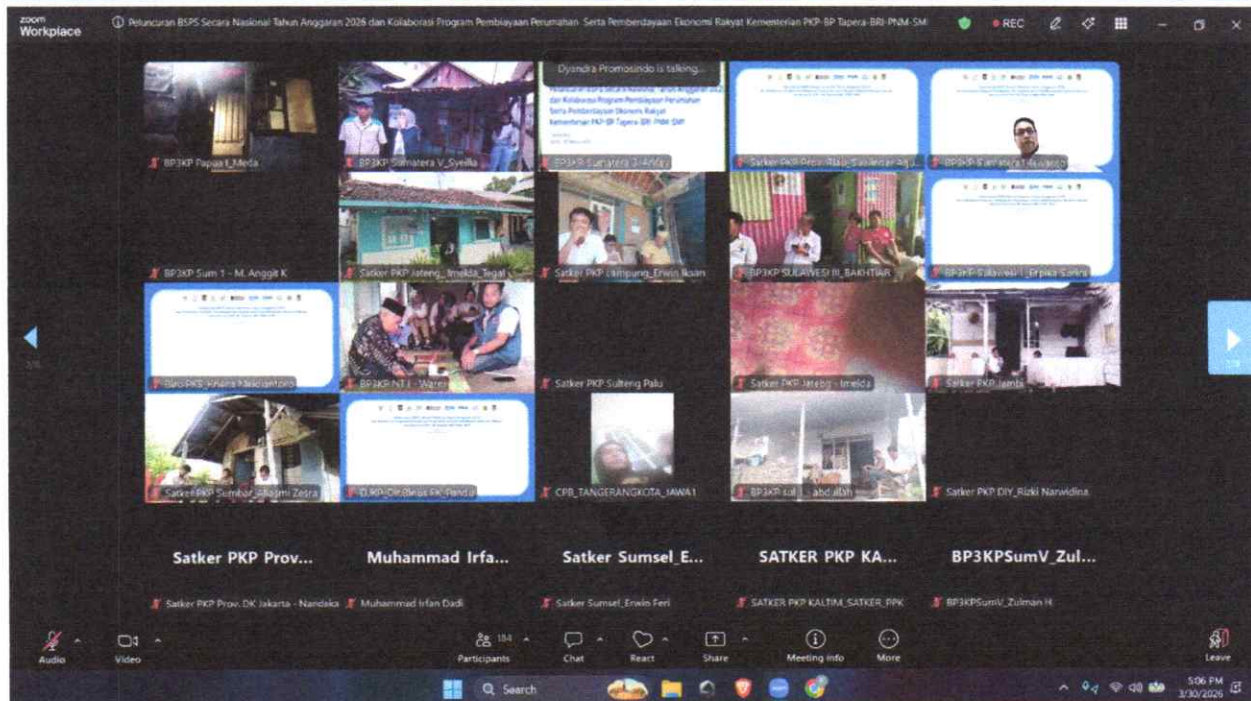
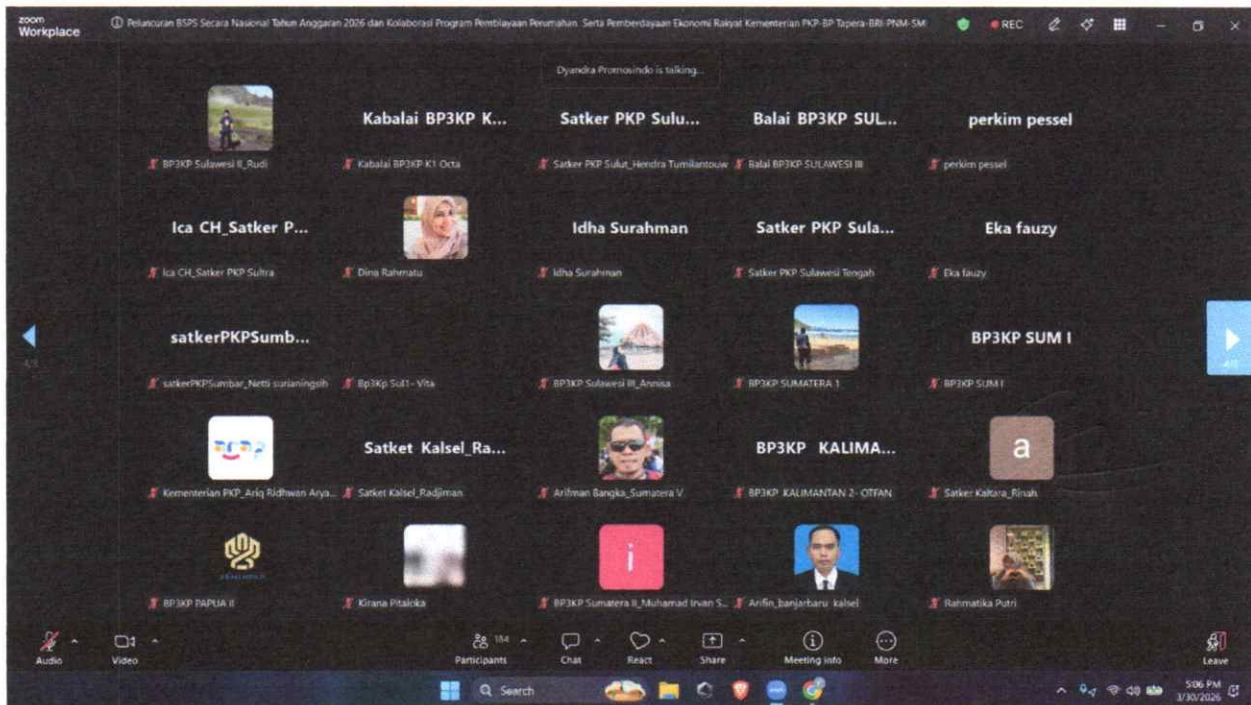
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI RAPAT

PELUNCURAN BSPS SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026 DAN KOLABORASI PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KEMENTERIAN PKP-BP TAPERA-BRI-PNM-SMF

30 Maret 2026







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN.
No. Surat : Ru.10/Dp/138/B/2026 /Tgl Surat : 27 Maret 2026
Hal : Undangan Peluncuran BSPS Secara Nasional TA 2026
dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP
Tapera-BRI-PNM-SMF.
No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 28 Maret 2026

Yth

☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman
☒ Pejabat Penandatanganan SPM
☒ Bendahara
☒ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
☒ Asisten KPA

☒ Kaur Teknik PPK Randal
☒ Kaur Administrasi PPK Randal
☒ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP
☒ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KP
☒ Cpnns

Sifat : ☐ Biasa ☐ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

☐ Memberikan dan menyampaikan saran
☐ Melaksanakan / Menindaklanjuti
☐ Bicarakan dengan saya
☐ Mohon hadir mewakili saya
☒ Ikut hadir / ~~Menugaskan~~ Staf
☐ Diketahui / Sebagai informasi
☐ Menyimpan dalam file
☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan

☐ Monitoring Perkembangan
☐ Dibahas bersama
☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan
☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur
☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya
☐ Untuk dipedomani
☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan
☐ Ikuti Zoom

Catatan

Zoom diruang rapat untuk
disiapkan



Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : Ru.10/Dp/138/B/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2
Hal : Undangan Peluncuran BSPS Secara Nasional TA 2026
dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP
Tapera-BRI-PNM-SMF

Jakarta, 27 Maret 2026

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan kualitas rumah serta peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, akan dilaksanakan Peluncuran BSPS Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026
Waktu : 1. Gladi Resik
11.00 – 12.00 WIB
2. Pelaksanaan Kegiatan
13.30 WIB – Selesai (Jadwal Terlampir)
Tempat : **Aplikasi Zoom Meeting**
1. Gladi Resik
<https://bit.ly/gladiresik30mar>
2. Pelaksanaan Kegiatan
<https://bit.ly/zoompeluncuranBSPS>
Meeting ID : 872 7492 6594
Password : BRI2026

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu serta menyiapkan data-data yang relevan terkait pelaksanaan BSPS, KPP dan PNM pada masing-masing wilayah kerja. Peserta wajib melakukan konfirmasi kehadiran pada tautan <https://bit.ly/konfirm30maret> paling lambat Sabtu, 28 Maret 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Pipit Prayogo (082138698262).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



[Signature]
Ir. Fitrah Nur M.Si.
NIP 196704191994031003

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Nomor : RU.10/Dp/138/B/2026
Tanggal : 27 Maret 2026
Hal : Undangan Peluncuran BSPS
Secara Nasional TA 2026 dan
Kolaborasi Program Pembiayaan
Perumahan Serta Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat Kementerian
PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera I;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera II;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera III;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera IV;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera V;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan I;
7. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan II;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa I;
9. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa II;
10. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa III;
11. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa IV;
12. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara I;
13. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara II;
14. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi I;
15. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi II;
16. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi III;
17. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Maluku;
18. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua I;
19. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua II.

B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Aceh;
2. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Riau;
5. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jambi;
8. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bangka Belitung;
10. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Lampung;
11. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Banten;
12. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DI Yogyakarta;
15. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bali;
18. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

20. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Barat;
21. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Utara;
25. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi IKN;
26. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Utara;
27. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Gorontalo;
28. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Barat;
30. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku;
33. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku Utara;
34. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua;
35. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua Barat.

C. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Aceh;
2. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sumatera Utara;
3. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sumatera Barat;
4. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Riau;
5. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
6. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;
7. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi;
8. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan;
9. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung;
10. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Lampung;
11. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Banten;
12. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi DKI Jakarta;
13. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Barat;
14. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi DI Yogyakarta;
15. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Tengah;
16. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Timur;
17. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Bali;
18. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Barat;
21. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Tengah;

22. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
23. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Timur;
24. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Utara;
25. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi IKN;
26. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Utara;
27. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Gorontalo;
28. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
29. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Barat;
30. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Maluku;
33. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Maluku Utara;
34. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Papua;
35. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Papua Barat.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



Ir. Fitrah Nyr, M.Si.
NIP. 196704191994031003

Lampiran II
 Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
 Nomor : RU.10/Dp/138/B/2026
 Tanggal : 27 Maret 2026
 Hal : Undangan Peluncuran BSPS
 Secara Nasional TA 2026 dan
 Kolaborasi Program Pembiayaan
 Perumahan Serta Pemberdayaan
 Ekonomi Rakyat Kementerian
 PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Senin, 30 Maret 2026

No	Waktu	Kegiatan
1	13.30 – 14.00	Registrasi Peserta
2	14.00 – 14.03	<i>Opening MC</i>
3	14.03 – 14.05	Pembacaan Doa
4	14.05 – 15.05	<i>Talkshow:</i> 1. Kebijakan KUR Perumahan oleh PKP 2. Tata cara pinjaman KUR Perumahan oleh BRI 3. Sosialisasi oleh PNM Mekar 4. Sosialisasi oleh Rumah Subsidi 5. Sosialisasi BSPS
5	15.05 – 15.08	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
6	15.08 – 15.18	Sambutan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)
7	15.18 – 15.28	Sambutan dari Bank BRI
8	15.28 – 15.38	Sambutan dari K/L Terkait (jika ada)
9	15.38 – 15.48	Sambutan dari Wakil Ketua DPR RI
10	15.48 – 16.18	Sambutan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	16.18 – 16.23	<i>Closing Statement</i> Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pembagian <i>reward</i> bagi PNM Berprestasi - Peluncuran BSPS Masal
12	16.23 – 16.25	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
13	16.25 – 16.28	Foto Bersama
14	16.28 – 16.38	<i>Press Conference</i>

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



Fitrah Nur, M.Si.
 NIP. 196704191994031003



TANPA DIPUNGUT BIAYA

OLEH PIHAK MANAPUN!!



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tangerang, 30 Maret 2026



Gambaran Umum BSPS

Landasan Hukum, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



Landasan Hukum

UU 1 Tahun 2011

Pasal 54

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu bentuk kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR berupa **stimulan rumah swadaya**

PP 14 Tahun 2016

Pasal 37 ayat (3)

entang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu bentuk kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR berupa **stimulan rumah swadaya**

PMK 05 Tahun 2021

168/PMK.05/2015
Jo.173/PMK.05/2016 Jo.
132/PMK.05/2021
tentang **Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga**

Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025

tentang Optimalisasi Pelaksanaan **Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Peraturan Menteri PKP No 10 Tahun 2025

tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

SE Ditjen TKPR No. 1 Tahun 2026

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Pengertian

Dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk **peningkatan kualitas** dan **pembangunan baru** rumah swadaya berdasarkan **kegotong-royongan**.

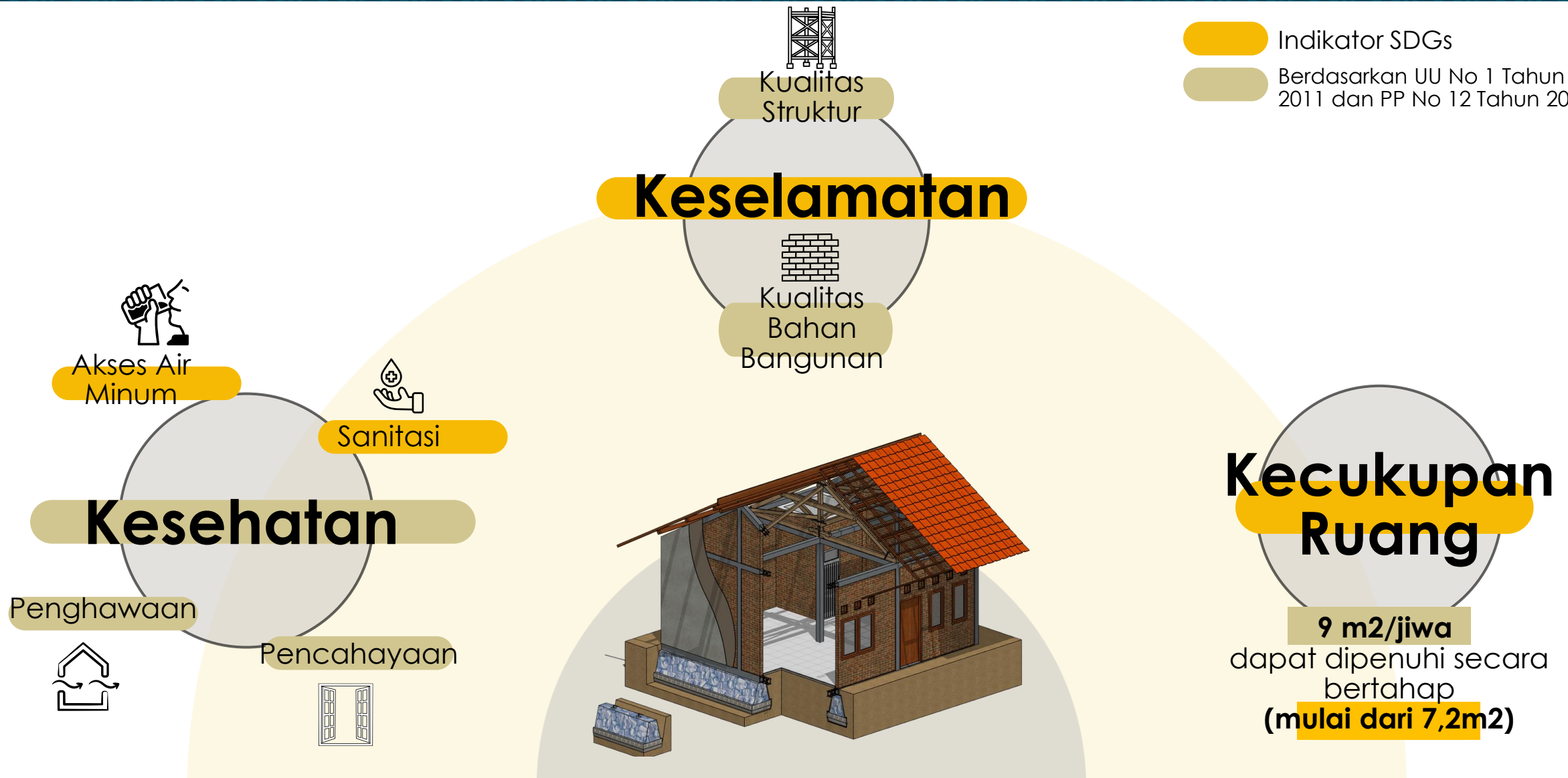
Tujuan

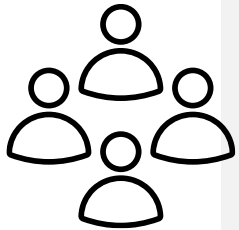
Mendorong dan meningkatkan **keswadayaan** masyarakat agar memiliki **akses** dalam memenuhi kebutuhan **rumah layak huni** secara swadaya

Manfaat

- 1 Menumbuhkan/kembangkan **gotong-royong**
- 2 Menggerakkan **ekonomi** rakyat
- 3 Menyerap **tenaga kerja**
- 4 Masyarakat lebih **sejahtera**

Indikator Rumah Layak Huni





Penerima bantuan sebagai **pelaku utama** dalam perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana bantuan



Bantuan bersifat **stimulan**, untuk **menumbuhkan keswadayaan** dan **gotong-royong**



Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Kabupaten/Kota (**Korkab/kot**) Adalah sebagai **fasilitator** yang **mendampingi** dan mengawal kegiatan agar Masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai **pelaku utama**

1 Kartu Keluarga
Penerima
Rumah

Nilai Bantuan

20 juta



**TANPA PUNGUTAN DARI
PIHAK MANAPUN!**

Persyaratan Penerima BSPS

Berdasarkan Verifikasi Lapangan



1 WNI yang sudah **berkeluarga** dan diprioritaskan masuk dalam **DTSN**



3 Memiliki rumah & menempati **RTLH** satu-satunya



5 Belum pernah memperoleh **BSPS/FLPP** 10 tahun, Terakhir **kecuali** bagi PB yang **terdampak bencana**.



2 Memiliki atau menguasai **tanah** dengan **bukti kepemilikan** dan penguasaan yang jelas dan **sah**



4 Termasuk kelompok **rumah tangga desil 4** ke bawah dan/atau **penghasilan maksimal UMK/UMP**



6 Bersedia mengikuti **ketentuan program**

Bukti Penguasaan Lahan

1 Sertipikat Hak Milik

2 Sertipikat HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan)

3 Bukti izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat atau tanah milik keluarga besar;

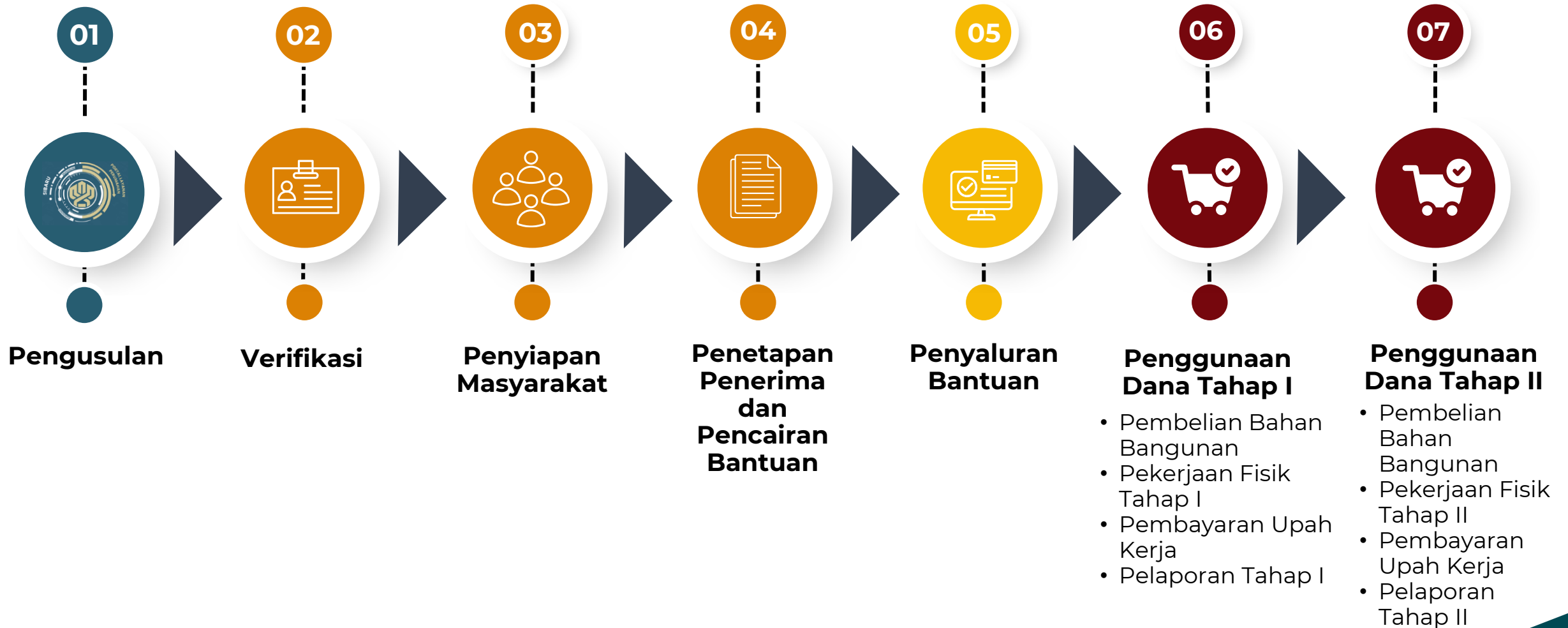
4 Bukti penguasaan tanah lainnya

- Surat keterangan ditandatangani oleh pejabat terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT), dengan meminta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bukan keluarga/tidak sedarah

- Dilengkapi dengan salah satu dokumen pendukung seperti akta hibah, akta jual beli, petok D, girik, leter C, pipil, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari Kantor Pertanahan

- Izin menempati sekurang-kurangnya hingga 10 tahun setelah pekerjaan fisik selesai.

Tahapan Kegiatan BSPS



Video Animasi BSPS

[Link: Video](#)



Video Animasi PTT

[Link: Video](#)

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS



► Nana



► Entu



► Serah



► Ibah Misbahudin



► Mamat

KABUPATEN
Majalengka
BSPS 2025

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS

Penerima Bantuan : Yusuf Nayowan (Kab. Bolaang Mongondow Selatan) - Keswadayaan Rp 10.000.000



0%



30%



100%

Penerima Bantuan: Adel (Kota Manado) – Keswadayaan Rp 1.000.000



0%



30%



100%

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS

Penerima Bantuan : Husnul Hatimah (Kab.Bulukumba) - Keswadayaan Rp 17.000.000



0%



30%



100%

Penerima Bantuan : Nurbeina Siregar (Kab. Tapanuli Selatan) - Keswadayaan : Rp. 30.000.000



0%



30%



100%

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS

Penerima Bantuan : Liman (Kab.Bulukumba) - Keswadayaan Rp 11.000.000



0%



30%



Penerima Bantuan : Maya Safitri (Kab.Penajam Paser Utara) - Keswadayaan Rp 2.500.000



0%



30%



100%

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kab.Langkat

[Link: Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kab.Langkat](#)

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kalimantan Timur



Link: Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kalimantan Timur



Terima Kasih





DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

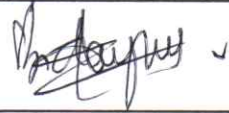
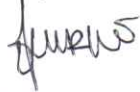
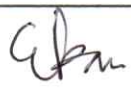
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Acara :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YOSEF SAHAICA	Penkoptikoltim.	Bupati	
2	JUMHANI.	DPRD Koltim	KETUA DPRD.	
3	PRIMARTO RUDA.	PEMSEP KOLTIM.	SEKPA Koltim.	
4	SUPRIANTO.	DPRD Koltim.	KETUA KOMISI 2.	
5	IKRA	PEMSEP Koltim.	KABID PU PR	
6	LISMA.	Penkoptikoltim.	PROKOPIM.	
7	DIRA PERIANTI.	PEMSEP KOLTIM	DOKPIM	
8	MERIN.	DEVELOPER.	PENGUSHA.	
9	MUH. IRSAN	SATKER PLKP	KASATKER	
10	LAODE SUDAFIN	SATKER PLKP	STAF	
11	Indah MH	"	staf	
12	MARHADIANTO	- - -	- - -	
13	MUNTAN	- - -	- - -	

12	Hamka Thahir	staf	
13	Aurpullah	TA	
14	Annisa	CPNS	
15	Nurul Bidayni Sukardi	CPNS	
16	Muh. FAKHRILANSA PUTRA	CPNS	
17	Mursyid Hidayat	CPNS	
18	Amalia Nur Annisa Rasibo	CPNS	
19	Moh. Rifal Agustina	CPNS	
20	Marhijannah	staf	
21	Yenni S. Bahri	staf	
22	Lewi Putung	staf	
23	ONI SURIKATY M	staf	
24	ALFONS YANTI	"	
25	AUDREY DANI	STAFF	
26	EKA MUKTI	staf	
27	Vince	staf	



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Koordinasi dan penyampaian informasi terkait program bantuan perumahan dan kawasan permukiman Kepada Pemda Kab. Kolaka Timur.
- Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
- Waktu : 17:30 WITA s/d Selesai
- Lokasi : Ruang Rapat Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peserta Rapat : A. Unsur Satuan Kerja
1. Kepala Satuan Kerja
 2. Asisten KPA
 3. Perwakilan PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman
 4. Staf Satuan Kerja PKP Prov. Sultra
- B. Unsur Pemda Kab. Kolaka Timur
1. Bupati Kolaka Timur
 2. Sekretaris Daerah Kolaka Timur
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 4. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur
 5. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
 6. Undangan terkait lainnya
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Pembahasan

1. Penyampaian dari Pemerintah Daerah Kolaka Timur

Pemerintah Daerah Kolaka Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meminta informasi terkait program bantuan perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Mengharapkan penjelasan mengenai prosedur pengusulan program bantuan.
- c. Meminta penjelasan terkait kriteria penetapan kawasan kumuh.

- d. Menanyakan apakah penetapan kawasan kumuh memerlukan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah.

2. Penjelasan Kepala Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis program bantuan, antara lain:

- a. Penanganan Kawasan Kumuh
- b. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Hasil verifikasi CPB Kabupaten Kolaka Timur:

- Lolos: 301 unit
- Tidak lolos: 69 unit

- c. Bantuan Rumah Susun (Rusun)

Contoh: Rusun Rumah Sakit Bombana dan Rusun ASN Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara

- d. Bantuan Sanitasi Rumah

Nilai bantuan sekitar Rp18.000.000 per unit

- e. Pemantauan realisasi rumah subsidi (FLPP)
- f. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan

Penjelasan Teknis dan Kriteria Program

- a. Kriteria Bantuan Rumah Susun (Rusun):

- Status tanah harus *clean and clear*
- Tersedia sumber listrik
- Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Unit rusun sudah termasuk meubelair
- Idealnya terdiri dari 44 unit per tower

- b. Penanganan Kawasan Kumuh:

- Mengacu pada 7 indikator kumuh
- Penetapan kawasan kumuh dilakukan melalui SK Bupati
- Kewenangan pemerintah pusat untuk penanganan kawasan kumuh di atas 15 hektare
- Penanganan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan CSR

- c. Program BSPS:

- Kuota BSPS Kabupaten Kolaka Timur yang sudah turun saat ini sebanyak 370 unit
- Syarat calon penerima:
 - 1) Termasuk kategori desil 1–4
 - 2) Memiliki satu-satunya rumah
 - 3) Berpenghasilan maksimal setara UMR/UMP
- Data CPB Tidak Lolos (69 Unit):
Disebabkan oleh:
 - 1) Tidak bersedia mengikuti program
 - 2) Tidak memiliki rumah
 - 3) Tidak memiliki lahan
 - 4) Rumah yang ditempati sudah layak huni
 - 5) Memiliki lebih dari satu rumah

Penggantian CPB akanr dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan untuk pengusulan calon penerima pengganti.

d. Program Lainnya:

- Usulan kawasan kumuh sebaiknya disinergikan dengan program nasional lainnya (misalnya: kampung nelayan, dll.)
- Bantuan rumah khusus diberikan kepada masyarakat terdampak program pembangunan pemerintah atau korban bencana

B. Kesimpulan / Tindak Lanjut:

1. Pemerintah Daerah Kolaka Timur akan menindaklanjuti informasi program dengan menyusun usulan sesuai prosedur yang berlaku.
2. TFL dan Korkab akan melakukan koordinasi ke Dinas Perumahan terkait penggantian CPB yang tidak lolos verifikasi.
3. Penetapan kawasan kumuh perlu dilakukan melalui SK Bupati sebagai dasar pengusulan penanganan.
4. Perlu adanya sinergi program antara pemerintah daerah dengan program nasional dan pihak lainnya.

Notulis


Laode Sirafin sarini, S.T.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI RAPAT

Koordinasi dan Penyampaian Informasi Terkait Program Bantuan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemda Kab. Kolaka Timur

31 Maret 2026



